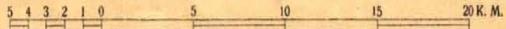




OVERZICHTSKAART VAN DE RESIDENTIE DJOKJAKARTA

Schaal 1:250000.



TOELICHTING

De onderlinge afstand tusschen de hoogtelijnen bedraagt 100 M. De geplaatste getallen geven de volstrekte hoogte in M. aan. Zie verder de toelichtende Nota voor de namen der particuliere landschappen.

CITRA YOGYAKARTA DALAM ARSIP

RES. KĒDOE

INDISCHE OCEAAN

RES. SOERAKARTA

LEGENDA.

-  Residentiehoofdplaats
-  Afdelingshoofdplaats
-  Districtshoofdplaats
-  Onderdistrictshoofdplaats
-  Gewone plaats
-  Spoorweg
- Tramweg
- Rijweg
- Karreweg



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, September 2005





SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia.

Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini hanyalah berisi sebagian dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 21 September 2005

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Sambutan Kepala Arsip Nasional RI | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| Pendahuluan | 1 |
| Daftar Pustaka..... | 18 |
| Citra Yogyakarta dalam Arsip | 20 |
| Geografi | 21 |
| Pemerintahan | 27 |
| Kesultanan Djogja | 37 |
| Politik..... | 48 |
| Bangunan Bersejarah | 86 |
| Pendidikan | 96 |
| Pemandangan Kota Yogyakarta..... | 112 |
| Keagamaan | 117 |
| Kerjasama..... | 122 |
| Perekonomian..... | 125 |
| Transportasi | 136 |
| Tamu Negara dan Tokoh Nasional..... | 144 |
| Industri..... | 151 |
| Kesehatan..... | 157 |
| Daftar Arsip yang Diserahkan..... | 160 |
| Penutup | 177 |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal. Kebijakan ini merupakan usaha untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang selama ini terjadi. Dalam pelaksanaannya, Otonomi Daerah ini belum berjalan dengan mulus.

Citra Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Arsip diharapkan dapat menampilkan gagasan pembangunan dan membangkitkan kesadaran anak bangsa di Provinsi tersebut bahwa NKRI yang kita nikmati saat ini merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para pendahulu kita. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI perlu ditingkatkan sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan Otonomi Daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam

memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program "**Citra Daerah**", yaitu penyerahan hasil alih media dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang akan diserahkan arsipnya pada Tahun 2005 ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diserahkan tersebut mencakup kurun waktu dari mulai awal abad 18 sampai dengan abad 20, yakni sejak Hindia Belanda sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan ini berisi informasi tentang berbagai interaksi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tersebut. Diharapkan hal itu dapat mendorong lahirnya rasa nasionalisme bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya perluasan khasanah arsip statis yang dimiliki provinsi tersebut.

Lingkungan dan Penduduk

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota besar dan pernah menjadi Kerajaan Besar di wilayah sekitar Jawa Tengah. Pada masa prasejarah di kota ini telah banyak dihuni oleh jenis manusia *Meganthropus Paleo Javanicus* atau manusia besar dari Jawa.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penghuni pertama di wilayah Yogyakarta berdasarkan peninggalan tertuanya adalah orang-orang Austronesia yang selanjutnya lebih dikenal dengan Bangsa Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan wilayah ini sebelumnya telah banyak dihuni oleh penduduk lainnya. Percampuran darah di antara mereka tentunya tidak dapat dielakkan, sehingga lahirlah suatu bangsa yang semakin lama semakin banyak mendiami wilayah Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian peninggalan jaman prasejarah yang berlangsung hingga sekarang, menunjukkan bahwa peninggalan

tertua yang terdapat di Yogyakarta ini adalah peninggalan berupa pecahan-pecahan keramik atau tembikar yang terdapat di Gunung Wingka di Pantai Samas yang membentang antara Desa Gadingarjo dan Desa Tirtaharga.

Masa Kerajaan

Pada abad ke 16, di wilayah Jawa Tengah muncul kerajaan lain sebagai pengganti dalam garis legitimasi yang mengalir dari Demak ke Majapahit yaitu Kerajaan Pajang yang diperintah oleh Raja Jaka Tingkir yang bergelar Hadiwijaya (1568 – 1586). Kekuasaan Kerajaan Pajang meliputi seluruh wilayah di Jawa Tengah termasuk Mataram. Pada waktu itu Mataram merupakan sebuah daerah bawahan Kerajaan Pajang. Karena mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Sultan Pajang, Kyai Ageng Pamanahan adalah pendiri Mataram putra dari Kyai Ageng Selo yang mengabdikan kepada Raja Pajang, mendapatkan daerah Mataram sebagai hadiahnya. Mataram yang berpusat di Kota Gede itu sangat makmur dan ramai dalam perdagangan. Dalam perkembangannya daerah tersebut menjadi daerah yang sangat penting dan menggantikan kedudukan Pajang.

Pada tahun 1575 Kyai Ageng Pamanahan mangkat digantikan oleh putranya Sutawijaya. Dalam perkembangannya Sutawijaya menyatukan beberapa daerah yang tidak suka berlindung di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang dan menghalang-halangi para bupati yang akan mempersembahkan upeti kepada Pajang. Tentu saja tindakan Sutawijaya ini sangat tidak disukai oleh Sultan Pajang, sehingga terjadilah perang antara Pajang dengan Mataram yang dimenangkan oleh Mataram. Setelah meruntuhkan Kerajaan Pajang, Sutawijaya memindahkan seluruh alat kebesaran Kerajaan Pajang ke Mataram. Sejak itu (1586) berdirilah kerajaan baru yaitu Mataram

dengan Sutawijaya sebagai raja pertamanya yang bergelar Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama.

Masa kejayaan Kerajaan Mataram ini berlangsung pada masa pemerintahan Raja Sultan Agung. Pada masa ini Sultan Agung pernah menaklukan secara berturut-turut antara lain daerah Wirosobo dan Lasem (1615), Pasuruan (1616), Gresik (1618), Tuban (1619) dan lain-lain. Tujuan dari penaklukan ini adalah untuk mempersatukan Pulau Jawa dan Madura. Pada tahun 1645 Sultan Agung mangkat dan digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Pada masa ini pengaruh asing terutama Belanda mulai masuk ke Kerajaan Mataram dalam segala bidang termasuk pemerintahan dan pada gilirannya membawa dampak yang kurang baik bagi kelangsungan hidup Kerajaan Mataram.

Kedatangan Bangsa Barat dan Pengaruhnya

Ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada Juni 1596 sampai di Banten yang merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun kedatangannya kurang diterima oleh Bangsa Portugis yang telah mendahuluinya dan orang-orang pribumi.

Pada tahun 1599 ekspedisi Belanda kedua yang dipimpin oleh Jacob van Neck mendarat di Maluku. Setelah mendiami Maluku cukup lama ternyata daerah tersebut dirasakan kurang memberikan keuntungan dalam perdagangan. Disamping itu, Maluku kurang begitu memuaskan untuk dijadikan markas besar dan jauh dari jalur perdagangan internasional. Akhirnya, pada masa pemerintahan Jan Pieterszoon Coen (1619) markas Belanda dipindahkan dari Maluku ke Banten. Walaupun sebenarnya pada tahun 1603 Belanda juga telah membangun tempat perdagangan VOC di Banten dan di Jayakarta tahun 1611.

Keberadaan Belanda di Banten membawa pengaruh yang kurang baik di sekitar wilayah itu, termasuk Mataram pada masa Pemerintahan Amangkurat I (1646 – 1677). Akibat pengaruh yang luas dari Belanda dan pertikaian yang terjadi di dalam lingkungan Kerajaan Mataram menyebabkan terjadinya perpindahan pusat kerajaan dari daerah Mataram ke Kartasura dan selanjutnya dipindahkan ke Surakarta yaitu terjadi pada masa pemerintahan Raja Pakubuwono II. Setelah mangkatnya Raja Pakubuwono II, kedudukan pemerintahan Kerajaan Mataram semakin terjepit. Terjadi konflik yang hebat di lingkungan keluarga raja Kerajaan Mataram yang pada gilirannya membawa dampak yang kurang baik bagi kelangsungan hidup kerajaan tersebut. Untuk meredam gejolak tersebut, akhirnya disepakati dan ditandatangani Perjanjian Giyanti (Palihan Nagari) tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi 2 (dua) yaitu Kasunanan Surakarta di bawah pemerintahan Raja Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta di bawah pemerintahan Raja Hamengku Buwono I.

Pengangkatan Hamengku Buwono I sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta, Hamengku Buwono I segera berusaha mengembalikan keamanan dan menguasai keadaan di wilayah yang dikuasainya.

Pergantian pemerintahan dari Belanda kepada Inggris dan masih terjadinya konflik yang hebat di dalam lingkungan Kasultanan Yogyakarta membawa konsekuensi bagi kedudukan kasultanan tersebut. Akibat adanya konflik tersebut dan pengaruh dari pendudukan Inggris tersebut akhirnya pada tahun 1812 Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) yakni Kasultanan Yogyakarta dan Pura Paku Alaman. Keadaan ini terjadi pada saat Kasultanan Yogyakarta diperintah oleh Sultan Hamengku Buwono II.

Penetapan Batas Wilayah

Penetapan batas-batas tanah antara lingkungan keraton dengan bagian luar keraton tidak banyak mengalami perubahan. Sejak Kerajaan Mataram berdiri dan kemudian terpecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Wilayah Kasultanan Yogyakarta tersebut tetap seperti semula yakni Daerah Kutanegara, Daerah Negara Agung, Daerah Mancanegara dan Daerah Pesisiran.

Daerah Kutanegara merupakan pusat kerajaan. Di tempat itu tinggallah raja beserta keluarganya dan para pejabat tinggi kerajaan. Daerah tersebut dapat disebut juga Daerah Narawita, yang berarti daerah tempat orang mengabdikan. Daerah Negara Agung merupakan daerah yang ada berada disekitar Kutanegara. Di tempat tersebut terdapat tanah-tanah lungguh para bangsawan keraton yang terbagi menjadi 8 (delapan) bagian yakni Daerah Bumi, Daerah Bumijo, Daerah Siti Ageng Kiwa, Daerah Siti Ageng Tengen, Daerah Sewu, Daerah Numbak Anyar, Daerah Penumping dan Daerah Pasekar. Bersama dengan Kutanegara daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah inti kerajaan.

Daerah Mancanegara merupakan daerah yang terletak di luar Negara Agung. Di daerah tersebut tidak terdapat tanah-tanah lungguh para pembesar kerajaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan daerah tersebut wajib menyerahkan pajak kepada keraton. Daerah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni Daerah Mancanegara Kulon dan Daerah Mancanegara Wetan. Sedangkan Daerah Pesisir merupakan daerah yang berada di luar Negara Agung, yang terbagi atas : Pesisir Kulon dan Pesisir Wetan.

Sementara itu, pejabat-pejabat negara yang berada di dalam lingkungan Kerajaan Mataram terbagi menjadi :

1. Pejabat-pejabat dalam Keraton dan Daerah Kutonegara yang terdiri dari Wedana Gedong Kiwo, Wedana Gedong Tengen, Wedana Keparak Kiwo dan Wedana Keparak Tengen;
2. Pejabat-pejabat dalam Negara Agung yang terdiri dari Patih, Wedana Jawi, Bupati dan Demang;
3. Pejabat-pejabat di wilayah Mancanegara terdiri dari Bupati yang bergelar Tumenggung yang dibantu oleh seorang Mantri atau Kliwon;
4. Pejabat-pejabat daerah Pesisiran terdiri dari Bupati atau Syahbandar, Kyai Demang atau Kyai Nyabehi;
5. Pejabat-pejabat khusus terdiri dari Tumenggung yang mengepalai keluarga Kalang (orang yang mengembara di hutan), keluarga Gowong (abdi dalam keraton) , keluarga Tuwaburu (pegawai raja yang bertugas menangkap binatang buas) dan Tumenggung yang mengepalai Kadipaten;
6. Pejabat-pejabat yang lebih rendah yakni Gandek yang bertugas menyampaikan perintah-perintah dari raja dan melaporkan apa yang dilihatnya di daerah.

Konsolidasi Dalam Pemerintahan

Sejak Kasultanan Yogyakarta dipecah menjadi 2 (dua), yakni Kasultanan Yogyakarta dan Pura Paku Alaman pada tahun 1812. Konsolidasi Sultan dalam pemerintahannya semakin kuat. Hal ini terlihat dari pemerintahannya yang sangat anti kepada Belanda. Sehingga taktik Belanda apapun untuk mempengaruhi kedudukan sultan tidak terpengaruh, bahkan secara terang-terangan menentang Belanda agar keluar dari lingkungan keraton dan Yogyakarta.

Karena masih turut campurnya Belanda dalam urusan dalam negeri Kasultanan Yogyakarta, muncullah penentangan yang lebih

keras terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta yaitu pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IV. Keadaan ini didukung oleh Pangeran Diponegoro yang sejak semula memang sangat tidak suka terhadap kehadiran Belanda di lingkungan Kasultanan Yogyakarta, yang sengaja membuat jalan dengan lebih dahulu memasang tonggak-tonggak melalui makam leluhur dari pangeran tersebut. Dengan berlatar belakang peristiwa tersebut pecahlah perang antara Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh Kyai Maja, seorang ulama di Solo yang banyak memberikan bantuan kepada pangeran tersebut dan Sentot Prawirodirdjo. Perang hebatpun terjadi yang berlangsung selama 5 (lima) tahun yakni 1825 – 1830. Selama kurun waktu tersebut, Belanda tidak dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Namun dengan tipu muslihat, akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dalam suatu pertemuan. Kemudian diasingkan ke Manado dan selanjutnya dibawa ke Makassar sampai wafatnya. Walaupun Pangeran Diponegoro dapat ditangkap dan diasingkan, perjuangan menentang Belanda agar keluar dari Yogyakarta terus berlanjut dan tidak pernah surut.

Untuk menjamin keamanan dan ketrentaman di Yogyakarta setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, Belanda menempatkan seorang residen dan tiga asisten residen di Yogyakarta dengan mengawasi daerah Bantul, Sleman, Kalasan dan Paku Alaman di Ibukota; di Kulonprogo mengawasi daerah Paku Alaman Adikarto; dan di Gunung Kidul mengawasi daerah Ngawen. Wilayah Kasultanan Yogyakarta dikurangi oleh Belanda dengan Banyumas, Bagelen, Kediri dan Madiun.

Pergerakan Nasional

Memasuki jaman pergerakan nasional, Yogyakarta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan itu. Pada masa itu, Kasultanan Yogyakarta diperintah oleh Sultan Hamengku Buwono VII

yang memangku jabatannya sejak 1877 sampai dengan 1921. Untuk mendukung pertumbuhan Budi Utomo maka pada bulan Oktober 1908, Yogyakarta menjadi tempat penyelenggaraan Kongres Pertama Budi Utomo, yang menghasilkan keputusan memajukan pengajaran, pertanian, teknik industri dan menghidupkan kembali kebudayaan.

Tahun 1912 di Yogyakarta berdiri pula Gerakan Muhammadiyah yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan. Dalam perkembangannya K.H. Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan *rechtspersoon*. Permintaan tersebut dikabulkan dengan surat ketetapan Gouvernement Besluit Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Pada dasarnya pendirian gerakan tersebut adalah untuk memajukan Agama Islam secara modern dan juga membuka hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Selanjutnya, tahun 1922 berdiri pula Gerakan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Pendirian gerakan ini adalah untuk memajukan pendidikan bagi kaum pribumi dan didorong oleh hasrat ingin turut bertanggung jawab atas pendidikan bagi bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu pula tahun 1922 dibentuk pula *Nationale Padvinderij* (Kepanduan Nasional) di bawah pimpinan Daslan Adiwarsita Wiro Tamtomo.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, ditetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia (KNI) di seluruh wilayah di Indonesia. Sebagai tindak lanjut pendirian KNI tersebut di Yogyakarta didirikan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang diprakasai oleh kelompok nasionalis tua yang mempunyai hubungan dengan pemimpin-pemimpin nasionalis di Jakarta antara lain Moh. Asrar. Melalui KNID ini dibentuklah Perkumpulan Kawula Ngayogyakarta (PKN) berjumlah tujuh orang di bawah pimpinan B.P.H. Suryodiningrat.

Pendudukan Jepang

Pada awal pendudukan tahun 1942 kekuasaan Sultan tetap seperti pada masa pendudukan Belanda, yakni Kabupaten Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sedangkan daerah Pakualaman hanya Kabupaten Adikarta. Namun dalam perkembangannya, Yogyakarta mengalami beberapa perubahan susunan pemerintahan. Yogyakarta merupakan Syu (Karesidenan), terdiri atas Syi (kotapradja), Ken (kabupaten), Gun (Kawedanan), Son (kecamatan) dan Ku (desa). Yogyakarta disebut daerah Koci (kasultanan). Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat sebagai Yogyakarta Ko.

Sebagai Ibukota Republik Indonesia

Memasuki gerbang kemerdekaan Indonesia membawa suasana baru bagi Yogyakarta. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 membawa nuansa baru bagi Yogyakarta. Ketetapan tentang hal ini diperkuat oleh Sultan Hamengku Buwono IX pada bulan September 1945, dalam amanatnya di depan rakyat Yogyakarta menyatakan :

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya;
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat

langsung dan Kami bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Belum lama Bangsa Indonesia menikmati Proklamasi Kemerdekaan datanglah tentara Sekutu yang dipimpin oleh Angkatan Perang Inggris mendarat di Jakarta. Bersamaan dengan itu, mendarat pula tentara Belanda yang bersikukuh ingin mengembalikan Indonesia menjadi bagian Hindia Belanda. Dalam situasi genting itu, Sultan menawarkan Yogyakarta sebagai pusat dan tempat kedudukan pemerintahan Republik Indonesia. Dengan adanya tawaran tersebut, maka dalam Sidang Kabinet tanggal 3 Januari 1946 memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Namun perpindahan pemerintahan itu belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, karena pada tahun 1947 dan 1948 Belanda menjalankan aksinya kembali dan terus melaksanakan penyerangan serta menggempur Yogyakarta. Melihat keadaan yang kurang menguntungkan itu, maka dalam Sidang Kabinet Presiden Sukarno memutuskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tetap berada di dalam kota, dan memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafrudin Prawiranegara supaya membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera pada 19 Desember 1948. Belanda selanjutnya menangkapi pembesarpembesar Indonesia antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Agus Salim, Ali Sastraamidjojo, Komodor Suryadarma dan pejabat tinggi lainnya.

Untuk menjamin keamanan dan ketrentaman pemerintahan di Yogyakarta dan agar Belanda dapat ke luar dari wilayah tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1949 dilaksanakanlah Serangan Umum.

Dengan adanya Serangan Umum tersebut, akhirnya Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan tanggal 28 Januari 1949. Untuk dapat melaksanakan resolusi

tersebut, maka pada April 1949 diadakanlah perundingan antara Mr. Moh. Roem dan dr. Van-Royen di bawah pimpinan Cochran anggota Komisi PBB untuk Masalah Indonesia yang berisi :

1. Penghentian tembak menembak;
2. Penarikan mundur Belanda dari Yogyakarta;
3. Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta;
4. Syarat-syarat dan waktu diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Sebagai tindak lanjut dari perundingan di atas, pada tanggal 1 Agustus 1949 diadakan perundingan antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federale Overleg (BFO) dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Critchley, berisi :

1. Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. Karesidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda dan pada tanggal 1 Juli 1949 Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerahnya itu;
2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta;
3. KMB diusulkan akan diadakan di Den Haag.

Dengan mundurnya tentara Belanda dari Yogyakarta, maka pada Juli 1949 Pemerintah Pusat Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Setelah pengembalian tersebut, secara berturut-turut Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan pembesar lainnya tiba kembali di Yogyakarta.

Dalam rangka pelaksanaan Perundingan KMB, di Yogyakarta dilangsungkan Konferensi Antar Indonesia (KAI) tahun 1949 dengan

menghasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat (NIS). Sebagai tindaklanjut dari perundingan sebelumnya, maka dilaksanakanlah perundingan KMB di Den Haag pada tanggal 7 Agustus 1949, Ketua Delegasi Indonesia adalah Moh. Hatta. Sementara itu, tanggal 29 Oktober 1949 di Jakarta dilakukan penandatanganan piagam persetujuan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah penutupan KMB Nopember 1949, maka sebulan kemudian tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara penandatanganan naskah pengembalian kedaulatan. Upacara tersebut dilaksanakan di dua tempat, di Amsterdam dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah RIS yang diwakili oleh Perdana Menteri Moh. Hatta. Sedangkan di Jakarta dilakukan oleh AHJ Lovink kepada Sri Sultan Hamengku Bu Hamengkubuwono IX sebagai wakil dari Indonesia.

Sehari setelah penyerahan kedaulatan tersebut, Presiden RIS, Soekarno meninggalkan Yogyakarta dan berangkat ke Jakarta. Pada saat itu Yogyakarta masih ditetapkan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh pejabat Presiden RI, Mr. Asaat.

Untuk mempersatukan kembali Indonesia yang sudah menjadi RIS, maka berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1950 ditetapkanlah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lahirnya undang-undang tersebut pada akhirnya membawa pengaruh pada daerah-daerah lainnya, yang selanjutnya meleburkan diri ke dalam NKRI dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Yogyakarta tidak lagi menjadi Ibukota Negara RI. Sejak saat itu Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa berstatus Swatantra I, melalui Undang-Undang No 3 Tahun 1950 dan merupakan bagian dari NKRI.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman digabungkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang secara administratif sejajar dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Pemerintahan bersifat demokratis, sebagai Kepala Daerah diangkat Sultan Hamengku Buwono IX sedangkan Paku Alam VIII diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1950 yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tahun 1957 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menentukan sistem pemerintahan daerah di Yogyakarta. Berdasarkan undang-undang tersebut ditetapkan bahwa pemerintahan daerah di D.I. Yogyakarta terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

Demokrasi terpimpin tahun 1963 berpengaruh pula pada pemerintahan daerah di D.I. Yogyakarta. Pada masa itu pertumbuhan Partai Komunis Indonesia (PKI) di wilayah tersebut menjadi semakin besar. Pemberontakan PKI di Jakarta tahun 1965 membawa dampak yang kurang baik pula bagi daerah tersebut. Dengan adanya pemberontakan PKI tersebut, mengakibatkan gugurnya 2 (dua) orang pejabat teras militer di wilayah tersebut yakni Komandan Korem 72 Pamungkas Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letnan Kolonel Sugiono.

Dengan adanya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) dari Kesatuan Aksi mahasiswa Indonesia (KAMI) dan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966, PKI dibubarkan dan Indonesia memasuki awal masa Orde Baru (ORBA).

Materi Arsip Yang Ditampilkan Dalam Citra Daerah

Dalam Citra Daerah Yogyakarta ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai ***Geografi Yogyakarta***. Penjelasan geografis ini digambarkan melalui Arsip Peta Topografi dan pembagian wilayah administrasi Karesidenan Yogyakarta yang berangka tahun 1921, peta Wates Srandakan Galoer, Sentolo Yogyakarta yang berangka tahun 1942, peta perencanaan Kota Yogyakarta yang berangka tahun 1945, hingga foto udara Kota Yogyakarta.

Masalah ***pemerintahan*** lebih banyak digambarkan lewat arsip yang dimulai dari arsip Perjanjian Giyanti antara Sultan Hamengku Buwono I dan Nicolas Hartingh yang berangka tahun 1744 mengenai pembagian daerah Kerajaan Mataram. Akte persetujuan tentang batas yang diperbaharui antara wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kasultanan Surakarta yang berangka tahun 1830. Akte tentang penobatan Sultan Hamengku Buwono V tahun 1836. Juga diketengahkan foto Presiden Soekarno yang berjalan menuju Sitihinggil Keraton Yogyakarta untuk dilantik sebagai Presiden RIS tahun 1949, dan Petisi Dewan Harian Yayasan Universitas Proklamasi (45) mengenai status Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1979.

Masalah ***Kehidupan Keluarga Keraton*** diawali dengan menampilkan arsip mengenai daftar bupati dan pegawai-pegawai Sultan beserta pendapatannya yang diperoleh dari tanah yang dimilikinya, berangka tahun 1825. Foto Sultan Hamengku Buwono VII dan bupati di depan keraton Yogyakarta tahun 1910. Foto mengenai posisi duduk resmi dari Permaisuri Sultan Hamengku Buwono VIII dan para Raden Ayu di Istana Yogyakarta. Diketengahkan juga foto Keraton Gedung Kuning tempat menerima tamu sultan. Foto prosesi Sultan Hamengku Buwono VIII di Keraton, silsilah putra-putra Sultan Hamengku Buwono VII dan Hamengku Buwono VIII serta saudara-saudara dari Sultan Hamengku Buwono IX.

Tema **Politik** mengetengahkan peta perang Diponegoro yang berangka tahun 1825 – 1830. Laporan dari Residen Yogyakarta Jl van Sevenhoven mengenai tanah Kasultanan Yogyakarta yang menyebabkan timbulnya perlawanan Diponegoro tahun 1826. Daftar tawanan pengikut Kyai Mojo di Yogyakarta tahun 1830. Ditampilkan pula mengenai keputusan hasil Kongres Pemuda Indonesia ke II di Yogyakarta tahun 1946, surat persetujuan pertama pengembalian Yogyakarta dan penjelasan singkat dalam kaitan perundingan Roem Royen, tahun 1949. Telegram Ketua PDRI Mr. Syarifudin Prawiranegara tentang susunan pemerintahan militer 1949, foto Panglima Besar Soedirman didampingi Letkol Soeharto tiba di Yogyakarta disambut Kolonel Suhud dan para perwira lainnya, tahun 1949.

Arsip mengenai **Bangunan** mengetengahkan foto gerbang utama benteng Vredenburg di Yogyakarta tahun 1896, tugu Malioboro tahun 1920, pintu Plengkung Asem tahun 1920, pemeliharaan rumah tahanan Wonosari tahun 1941. Gereja Katholik di Panembahan tahun 1951, Masjid Syuhada di Yogyakarta tahun 1952. Gedung Negara bekas Istana Presiden Soekarno di Mardimulyo tahun 1953, gedung Kantor Pos tahun 1954 dan arsip mengenai notulen rapat masalah pengairan dari Kali Opak di Yogyakarta tahun 1922.

Perkembangan **pendidikan** digambarkan oleh arsip foto mengenai peresmian Perguruan Tinggi Gajah Mada di Istana Presiden 1950 dan peletakan batu pertama Universitas Negeri Gajah Mada oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta tahun 1952.

Kegiatan **keagamaan** diwakili oleh foto tentang kutbah Agama Islam di Masjid Besar tahun 1951 dan pawai arak-arakan abdi dalam keraton dalam acara Grebeg Maulud.

Kegiatan **perekonomian** terlihat dari arsip mengenai catatan pendapatan sultan, peredaran mata uang, foto mengenai pedagang

tikar dan sayur, Sri Sultan Hamengku Buwono IX meninjau pasar, dan pembukaan Pabrik Gula Madukisno oleh Presiden Soekarno tahun 1958.

Kegiatan **transportasi** diawali dengan menampilkan arsip tentang perbaikan jalan Yogyakarta – Borobudur, foto alat pengangkutan berupa gerobak yang ditarik lembu, andong dengan kusirnya yang dipergunakan sebagai kendaraan dinas Kabupaten Gunung Kidul, pembukaan jalan raya Dekso – Samigaluh Kabupaten Kulonprogo, dan upacara pembukaan jembatan Jenderal Sudirman tahun 1958.

Kunjungan **tamu negara** tergambar dari arsip foto rombongan Perdana Menteri Nehru dan Presiden Soekarno sedang mendengarkan penjelasan mengenai wayang, Perdana Menteri Kamboja Norodom Sihanouk dan rombongan tiba di lapangan terbang Adisucipto yang disambut oleh Sultan Hamengku Buwono IX tahun 1959.

Kegiatan **kerajinan** diawali dengan foto kunjungan Presiden Soekarno ke tempat pembatikan dengan canting, rombongan Presiden Elpidio Quirino dan Presiden Soekarno sedang melihat-lihat batik yang dipamerkan di Kepatihan, pembuatan barang-barang dari perak ukir oleh perusahaan seni ukir perak tahun 1954.

Usaha pemeliharaan **kesehatan** terlihat dari arsip mengenai pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah, pendirian Sekolah Juru Kesehatan di Yogyakarta tahun 1957.

Daftar Pustaka

Darban, Ahmad Adab, dkk.

1998 *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Batavia

Kutoyo, Sutrisno, dkk.

1976 *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Lombard, Denys.

2000 *Nusa Jawa : Silang Budaya : Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Marsudi, Djamal, dkk.

1985 *Sejarah Perjuangan : Yogya Benteng Proklamasi*, Yogyakarta : Badan Musyawarah Musea.

Riyanto

1989 *Sejarah Kontemporer : Sejak Pendudukan Jepang Sampai Masa Liberal*, Solo : Sebelas Maret University Press.

Ricklefs, M.C.

1991 *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie. Batavia

Suwarno, P.J.

1994 *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 – 1974 : Sebuah Tinjauan Historis*, Yogyakarta : Kanisius.

Soetjipto Irawan.

1976 *Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta :
Pradnya Paramita.

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

1992 *Profil Propinsi RI: DIY Yogyakarta*. Jakarta.

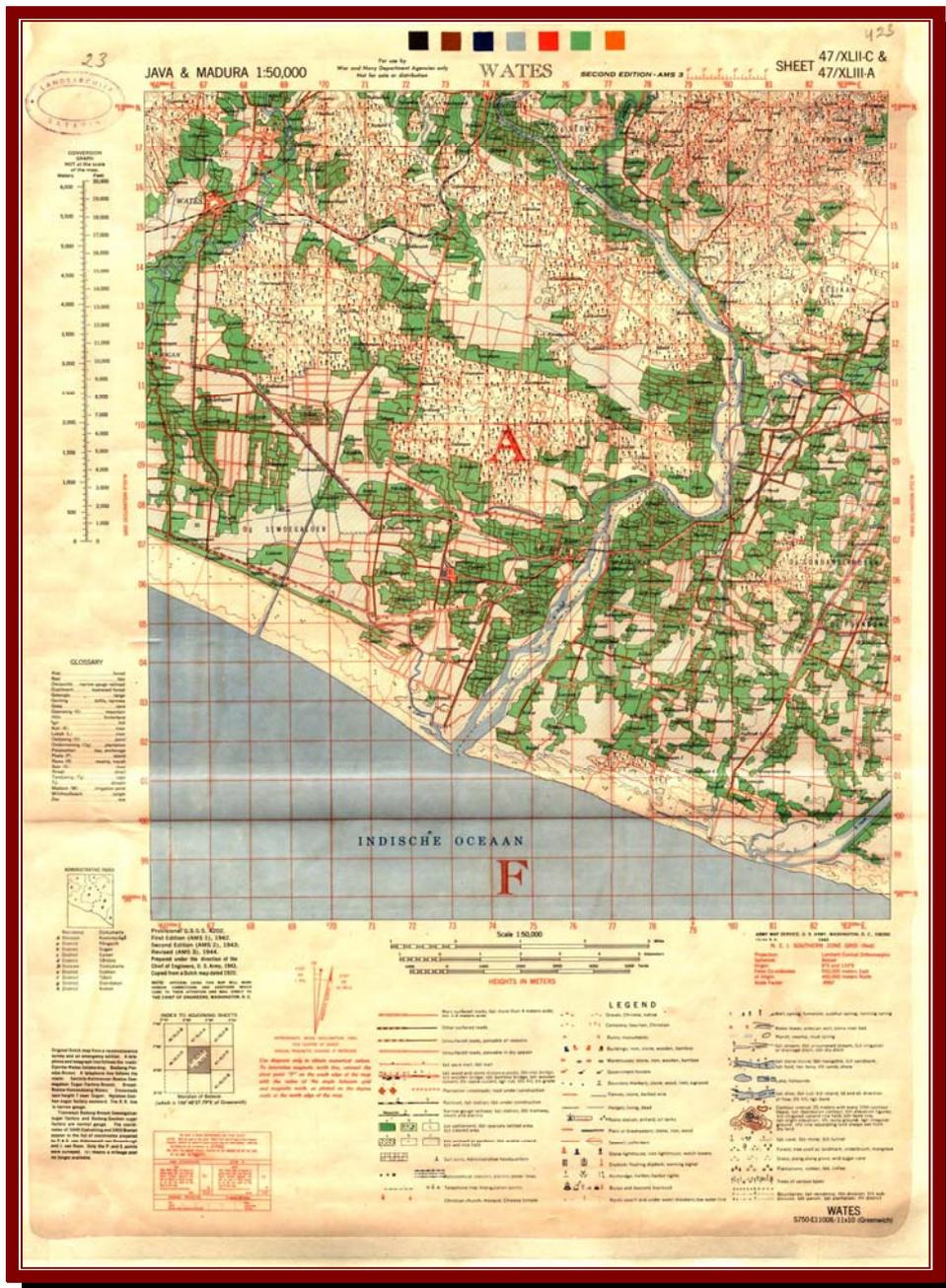
CITRA YOGYAKARTA DALAM ARSIP

Geografis

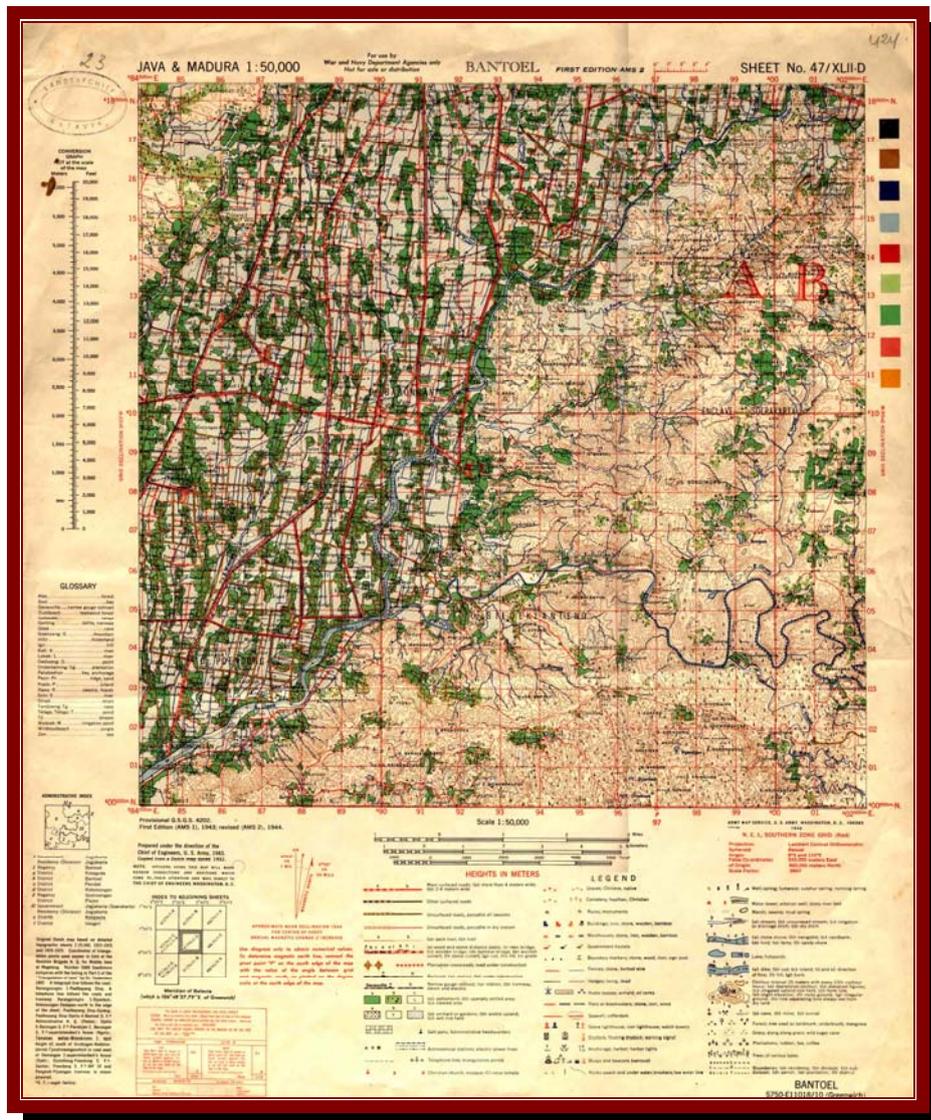


Peta topografi dan pembagian wilayah administrasi
Karesidenan Yogyakarta, 1921.

Peta Indonesia No. 163/16



Wates Srandakan Galur, Sentolo Yogyakarta, 1942.
Peta Indonesia No. 423/47/XLII-C dan 47/XLIIIA/23



Bantul (Imogiri, Kebanongan) Yogyakarta, 1944.
Peta Indonesia No. 1899 – 1960/424/47/XLII-D/23



Peta perencanaan Kota Yogyakarta,
cetak ulang tahun 1945.
Peta/1291/47/XLII/46



Foto udara Kota Yogyakarta
KIT No. 754/57

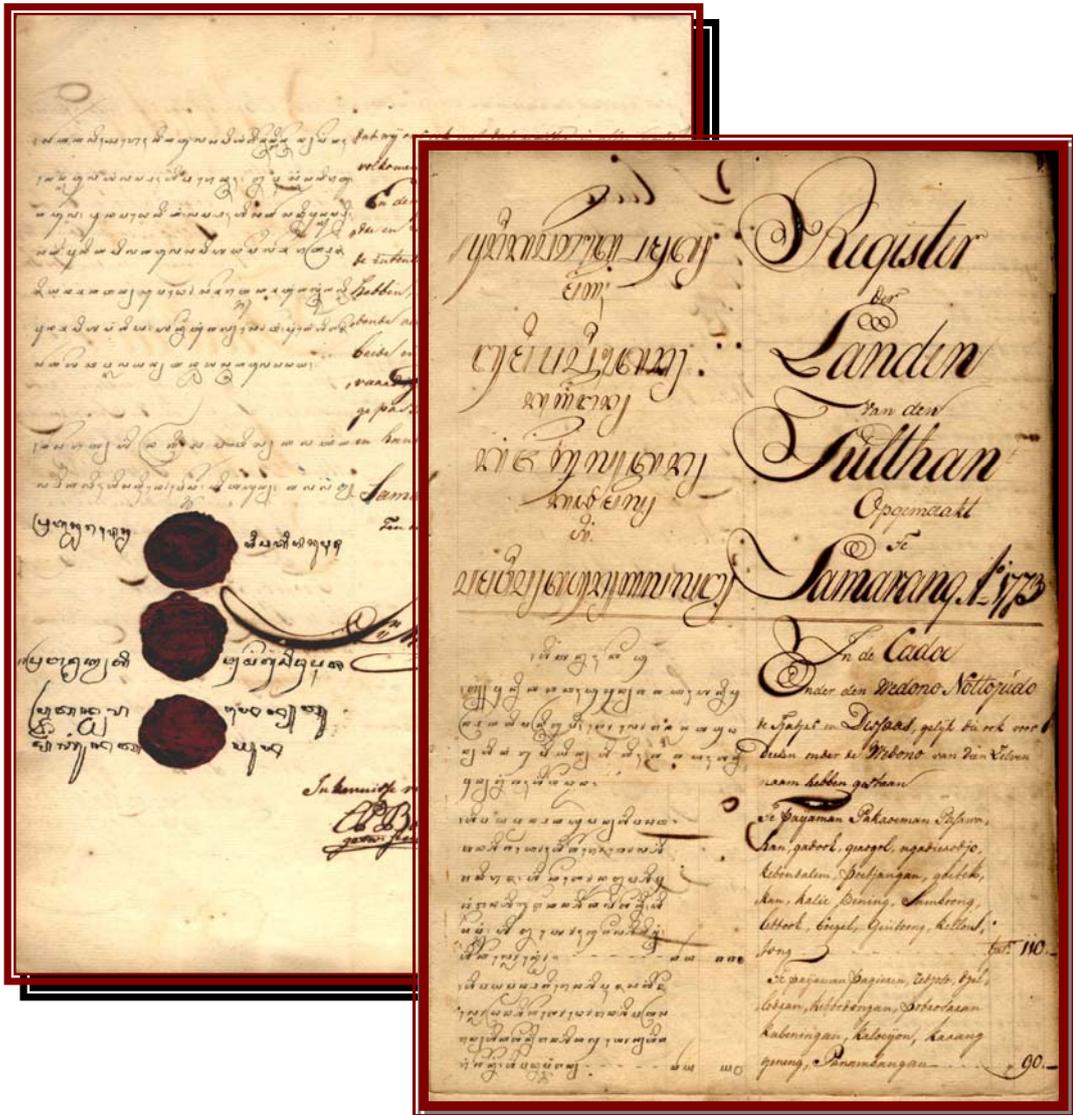
Pemerintahan



Peta Ibukota Yogyakarta dan Istana Sultan, 1830
Koleksi Khusus

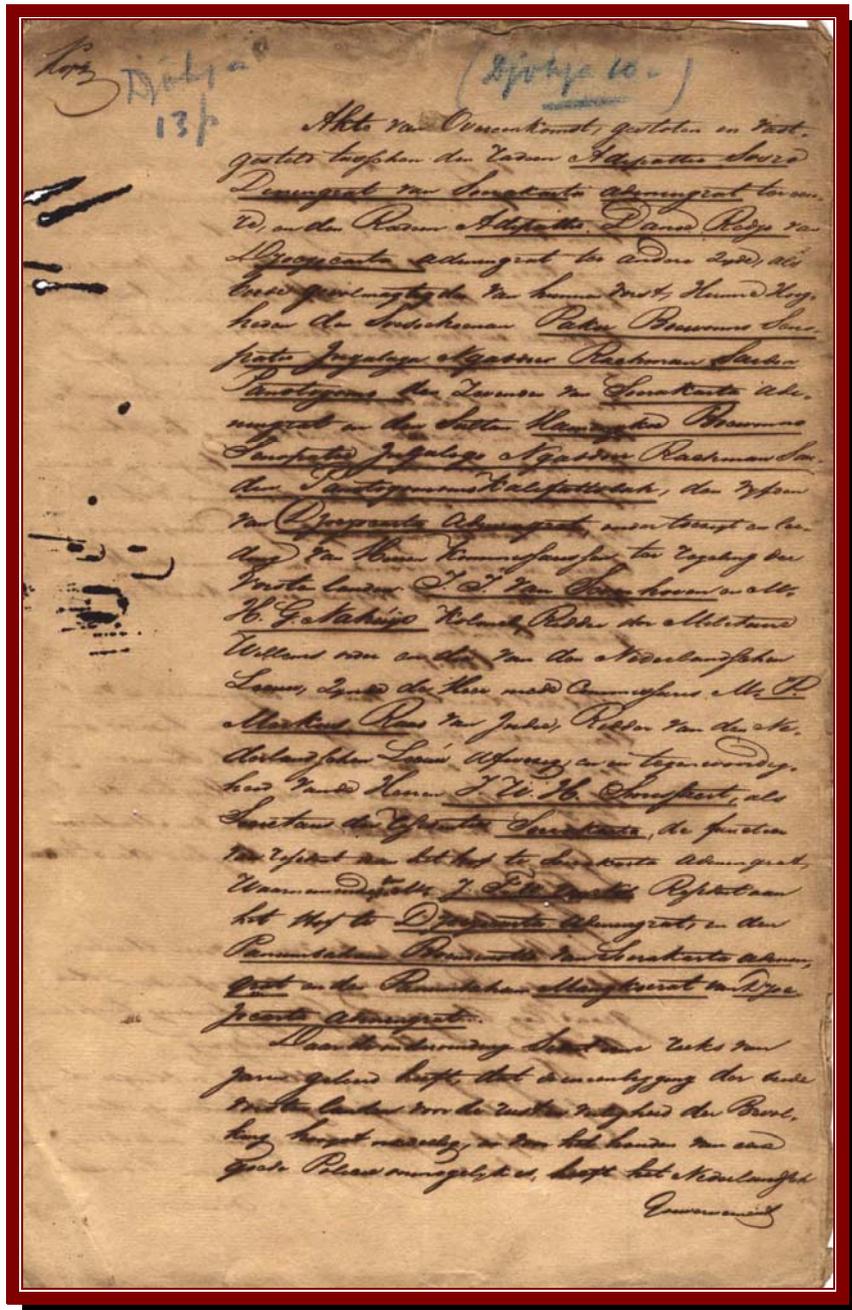


Perjanjian Giyanti antara Sultan Hamengku Buwono I dan Nicolas Hartingh mengenai pembagian daerah Kerajaan Mataram, 1755.
Djokja No. 42/1

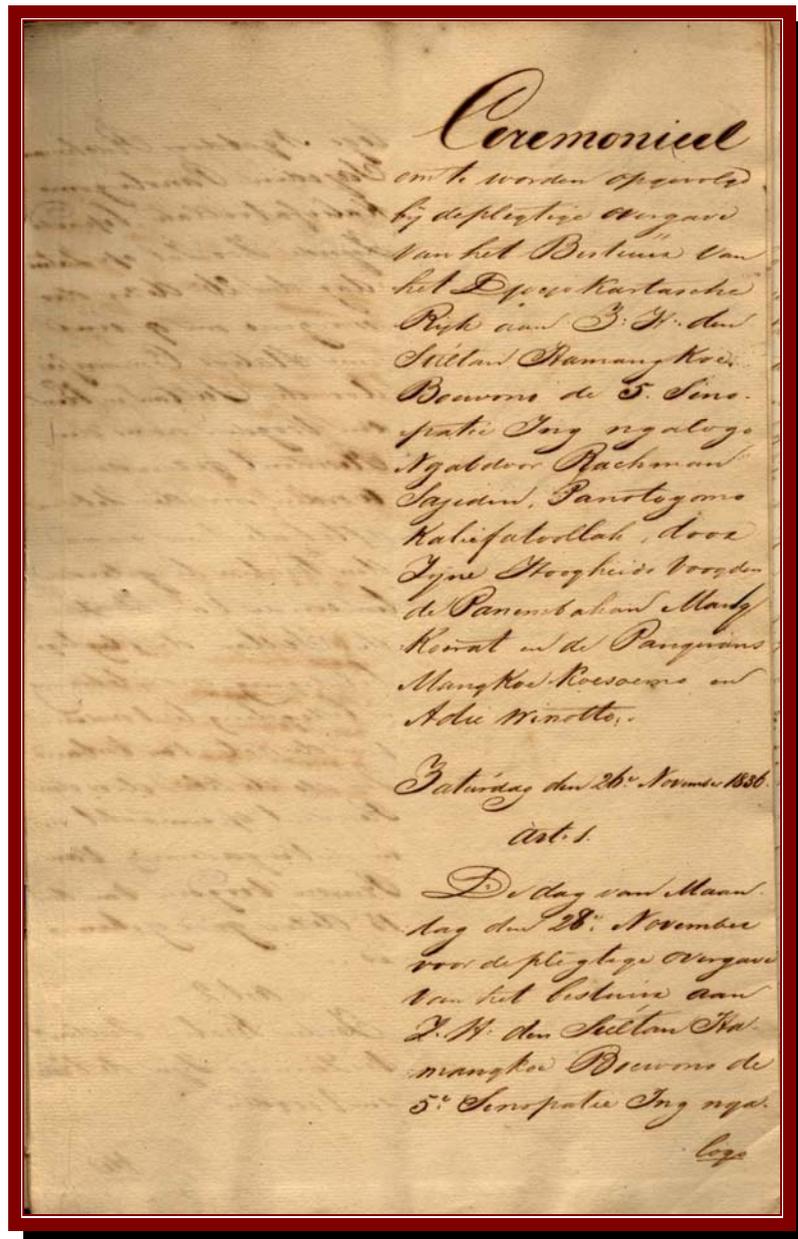


Daftar tanah yang dimiliki Sultan Djokja yang dibuat di Semarang, 1773.

Djokja No. 43



Akte persetujuan tentang batas yang diperbaharui
antara Wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta,
27 September 1830.
Djokja No. 10-1



Akte tentang penobatan Sultan Hamengku Buwono V,
Sabtu, 26 November 1836.

Djokja No. 9-8



Defile Pasukan TNI pada pelantikan Soekarno
sebagai Presiden RIS di Yogyakarta.
Kempen GM1-591217 (17 Desember 1949)



Soekarno berjalan menuju Sitihiinggil Keraton Yogya untuk
melakukan pelantikan Presiden RIS.
Kempen GM8-91217 (17 Desember 1949)

berkenan meniadakan status Daerah Istimewa bagi Aceh, agar terdapat keseragaman dalam tata pemerintahan daerah diseluruh kepulauan Nusantara, meskipun Bangsa dan Gal Ika itu.

Selanjutnya sehubungan ini, kami yakin fihak yang berpat dan sependirian dengan anda saat ini, bahwasanya bijak karang juga berkenan mengamb agar supaya status sebagai Daerah Yogyakarta (DIY) maupun Aceh daripada agak berlainan set kondisi masyarakat di kedua timewa didalam Negara Republik. Kalau kami tidak khilaf teta wa bagi Aceh adalah penting sebut diatas, sedangkan untuk mengingat akan perjuangan dewan NASIONAL BANGSA INDONESIA Mataram menyerbu Batavia pada joangan Almarhum tadi telah BUWONO I (Pangeran Mangkubum BUWONO IX sejak Proklamasi K ngan saat sekarang ini, hingga matan T.N.I. bahkan yang p e siden R.I. pada tahun 1978 y dari Beliau demi kepentingan an Nusantara disbnya, makaras akan pandangan Rakyat Indone dap Kepala Daerahnya yang me benar benar mendapatkan temp mana Kepala Daerah Daerah Ia berp redikat pula selaku Pim Khalifatullah Sayidin Panoto Akhirnya besar ini dan kami yakin pula akan dan untuk itu kami haturkan

DEWAN HARIAN
YAYASAN UNIVERSITAS PROKLAMASI (45)
PENGABDIAN EX PELAJAR DAN MAHASISWA PEJUANG BERSENJATA INDONESIA / EX TNI BRIGADE XVII
berlandaskan U.U.D. 1945 dan Pancasila
Alamat : Jalan Suryowijayan 14 — Yogyakarta (Kulon Beteng)

TEMBUSAN

Yogyakarta, 17 Juli 1979

Nomor : 408/SK/YUP/VII/79

Lampiran : -

Sifat : Penting/Segera

Perihal : Petisi tentang status Daerah Istimewa Yogyakarta .

K e p a d a

Yth. BAPAK MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

di

J A K A R T A . -

Dengan hormat,

Perkenankan dengan ini kami mengajukan Petisi tentang status Daerah Istimewa Yogyakarta , ialah permohonan kepada fihak yang berwajib agar berkenan meninjau kembali ketentuan yang terdapat didalam perundang-undangan yang masih berlaku sampai dengan saat sekarang ini tentang status daripada Daerah Istimewa Yogyakarta (Undang-Undang No. 3/1950), khususnya ketentuan yang menyebutkan setelah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta SRI PADUKA SULTAN HAMENGKU BUWONO IX yang memerintah pada wilayah Ex Kasultanan Yogyakarta secara naluri semenjak bertakhtanya SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO I (pertama) diabad ke XVIII yang lalu dan yang adalah penerus daripada perjuangan SULTAN AGUNG HANYOKROKUSUMO dari Mataram pada abad ke XVII yang lalu pula, terutama dalam perjuangan Almarhum Pahlawan Nasional Bangsa Indonesia tersebut diatas dalam melawan fihak Penjajah, dikemudian hari mangkat (wafat), maka jabatan Kepala Daerah di Yogyakarta bukan lagi akan dijabat secara naluri seperti sampai dengan saat sekarang ini, melainkan yang akan diatur dengan ketentuan yang juga berlaku di daerah/propinsi lain di Tanah Air kita, hingga dengan demikian akan berarti berakhirlah status Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Adapun Petisi ini kami ajukan setelah mengingat bahwa di Negara Republik Indonesia hanya kita dapati 2 (dua) Daerah Istimewa masing-masing Daerah Istimewa Yogyakarta di pulau Jawa dan Daerah Istimewa Aceh di pulau Andalas (Sumatera) dan yang latar belakang terbentuknya kedua Daerah Istimewa tersebut diatas adalah berlainan adanya. Dan dengan akan berakhirnya status wilayah Ex Kasultanan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta nanti sebagaimana kami ajukan tersebut tadi, maka adalah wajar dan adil jika fihak yang berwajib dikemudian hari juga berkenan meniadakan

2305/SP/m/79

Petisi Dewan Harian Yayasan Universitas Proklamasi (45)
mengenai status Daerah Istimewa Yogyakarta,
17 Juli 1979.

Setwapres Adam Malik No. 205

Kesultanan Djogja

546 [A] *opz. 6*

Lijst der nog aanwezige Regenten Matris en andere hoefden benoemd de bediening van S. H. den Sultan met behouding van land zij tot dien einde houd hebben, en de inkomsten welke zij van die landen genieten.

| Naam der Regenten matris en andere minderhoef. | Inkomsten | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| | Land | Posten |
| van | Op | aan |
| Raden Adipatun Dhawaraja | 1400. | |
| De Pachtpenningen welke de Rijksoverheid zelf ontvangt | | 8086. |
| 1 ^o opstaand aan de Patichs en andere | | |
| Kinnarun. | | 6686. |
| voor de Penokawans en andere bediening | | |
| den welke geen rijstakker hebben | | |
| maar alleen Frachten betalen | | 1110. |
| | 1400. | 15886. |
| Raden Mas Fremengony | 150. | |
| De Pachtpenningen welke de raden Mas Fremengony zelf ontvangt | | 3272.68. |
| Pachtpenningen voor zijne onderdanen | | 862.18. |
| | 150. | 4125. |
| Raden Fremengony Mangpondiwaja | 250. | |
| De Pachtpenningen welke de Regent zelf ontvangt | | 2350. |
| Pachtpenningen voor zijne onderdanen | | 354. |
| | | 2704. |
| Mas Fremengony Mangpondiwaja | 64 | 293.30. |

Daftar Bupati dan pegawai-pegawai Sultan
beserta pendapatan yang diperoleh dan tanah yang dimilikinya,
28 September 1825.
Djokja No. 6-13



Sultan Hamengku Buwono VII dan Bupati
di depan Keraton Yogyakarta.
KIT 129-6 (1910)



Permaisuri Hamengku Buwono VII di depan Keraton Yogyakarta.
KIT 225-50 (1920)



Sultan Hamengku Buwono IX ketika remaja.
KIT 214-64 (1926)



Posisi duduk resmi dari Permaisuri Sultan Hamengku Buwono VIII
dan para Raden Ayu di Istana Yogyakarta.

KIT 212-58



Gusti Kanjeng Ratu Maduretno Kertonegoro, istri dari Raden
Tumenggung Kertonegoro, Yogyakarta.

KIT 276-30



Keraton Gedung Kuning tempat menerima tamu kesultanan.
KIT 07-4



Prosesi Sultan Hamengku Buwono ke VIII di Keraton.
KIT 213-16



Taman Sari tempat pemandian dan peristirahatan keluarga
Kesultanan Yogyakarta.
Kempen 530603 GM2-2

ZONEN VAN XXX SULTAN VII.

Wettige vrouw:

- | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|
| 1. G.P.H. Tedjokoesoemo (Goesti Pangeran Harjo) | 75 jr. | Dansmeester Kraton | Tedjokoesoeman (Koelon Beteng) |
| 2. G.P.H. Notoprodjo | 70 jr. | Dansmeester | Mantridjeron. (Kidoel Gading). |
| 3. G.P.H. Hadikoesoemo | 63 jr. | Hfd. Wajang/Gamelan | Ngadikoesoeman. |
| 4. G.P.H. Boeminoto | 50 jr. | Hfd. Comptabiliteit | Bintaran Tengah. Kraton. |

Bijvrouwen:

- | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5. B.P.H. Soerjodiningrat (Bandoro Pangeran Harjo) | 69 jr. | Oud-voorzitter PKN | Soerjodiningtatan. (Perkoempoelan Kawoelo Ngajogjokerto) |
| 6. B.P.H. Soerjomataram.) | 60 jr. | Kjai (Bringin) | Djojokoesoeman. |
| 7. B.P.H. Djojokoesoemo } | 58 jr. | Adjutant Sultan | Djojokoesoeman. |
| 8. B.R.M. Bono (Bandoro Raden Mas) | 48 jr. | Werkeloos. | Soerjopoetran. |
| 9. B.P.H. Hadinegoro. | 52 jr. | Kashouder Kraton. | Bintaran Kidoel. |

ZONEN VAN SULTAN VIII.

Wettige vrouw:

- | | | | |
|--------------|--------|--|--|
| 1. Sultan IX | 40 jr. | | |
|--------------|--------|--|--|

Bijvrouwen:

- | | | | |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2. G.P.H. Hangabehi. | 46 jr. | Schoolopl. A.M.S. Hfd. hofdienaren | Ngabean Ngadisoerjan. |
| 3. B.P.H. Proboeningrat. (Tingkarto) | 44 jr. | Indoloog. Hfd interne econ. aangelegenheden Kraton. | In de Kraton. |
| 4. B.P.H. Mangkoediningrat. (Kartolo) | 45 jr. | Opl. A.M.S. | Ngampilan. |
| 5. B.P.H. Soerjobrnto. (Alposoesilamin) | 35 jr. | Secretaris Sultan. | Soerjowidjajah. |
| 6. B.P.H. Poedjokoesoemo. (Moendjiti) | 31 jr. | Opl. 1ste kl. MULU. Afd. Wajang/Gamelan. | Poedjokoesoeman. |
| 7. B.P.H. Poerobojo. | 46 jr. | Opl. R.H.S. Secretaris, Sultan tevens vertrouwing Sultan. | Ngasem. |
| 8. B.P.H. Bintoro. (Raisoel) | 38 jr. | Indoloog. Vert. Sultan in de Kepatihan. Secr. Sultan buitenkratonse aangelegheden. | Rotowidjajan. |
| 9. B.P.H. Moendaningrat. (Kirami) | 33 jr. | R.H.S. Sultan . In Ned. geweest. Bedewerker Poerobojo i/d Kepatihan. | In de Kraton. |

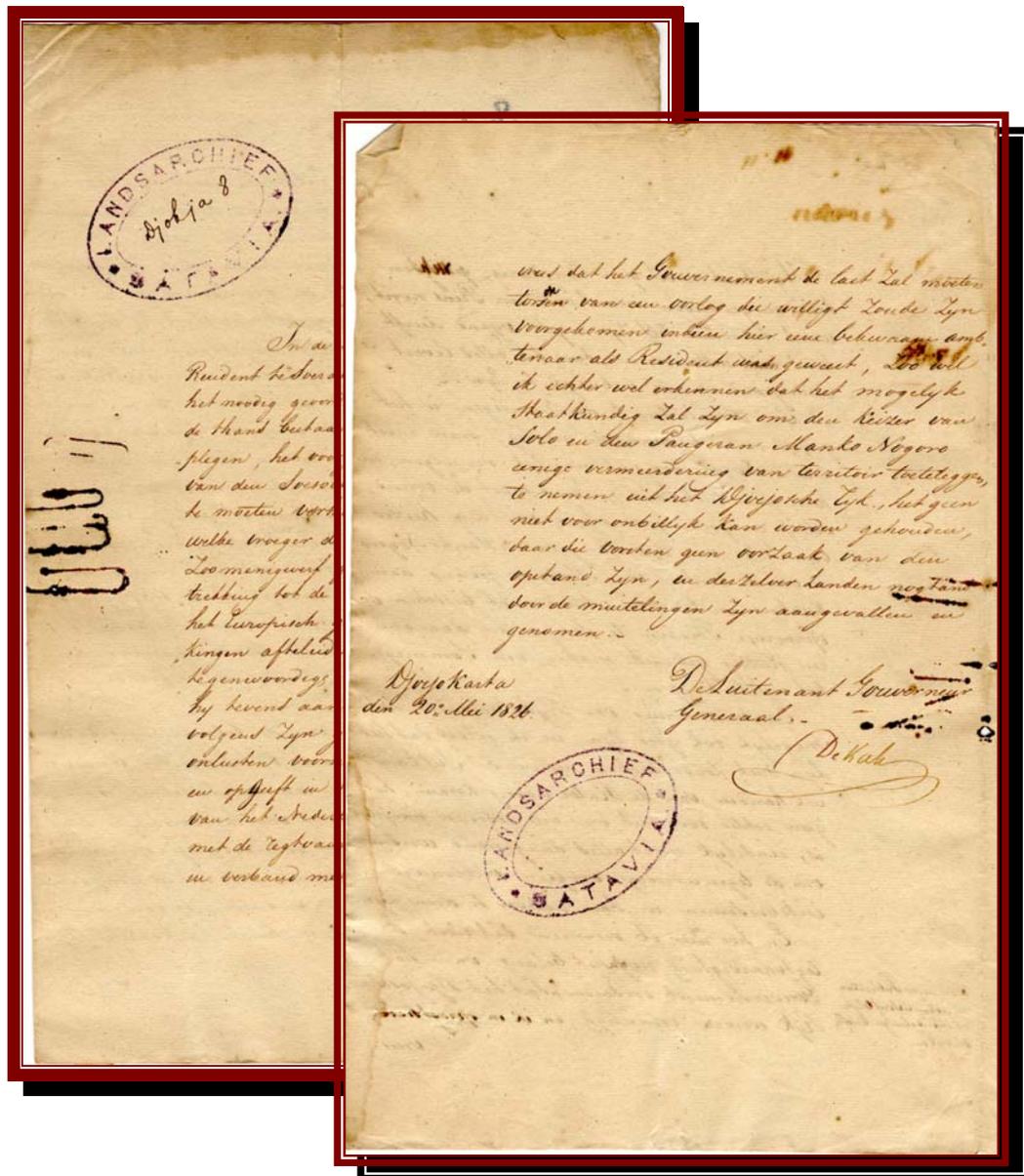
Silsilah putra-putra Sultan Hamengku Buwono VII dan Hamengku Buwono VIII dan saudara-saudara dari Sultan Hamengku Buwono IX.

Djokja Documenten No. 312

Politik



Peta Perang Diponegoro, 1825 – 1830.
Koleksi Khusus



Advis dari Letnan Gubernur Jenderal H.W. de Kock atas nota
Residen Surakarta berkenaan dengan perlawanan terhadap Mataram
(termasuk Yogyakarta),
20 Mei 1826.
Djokja No. 8-2

52

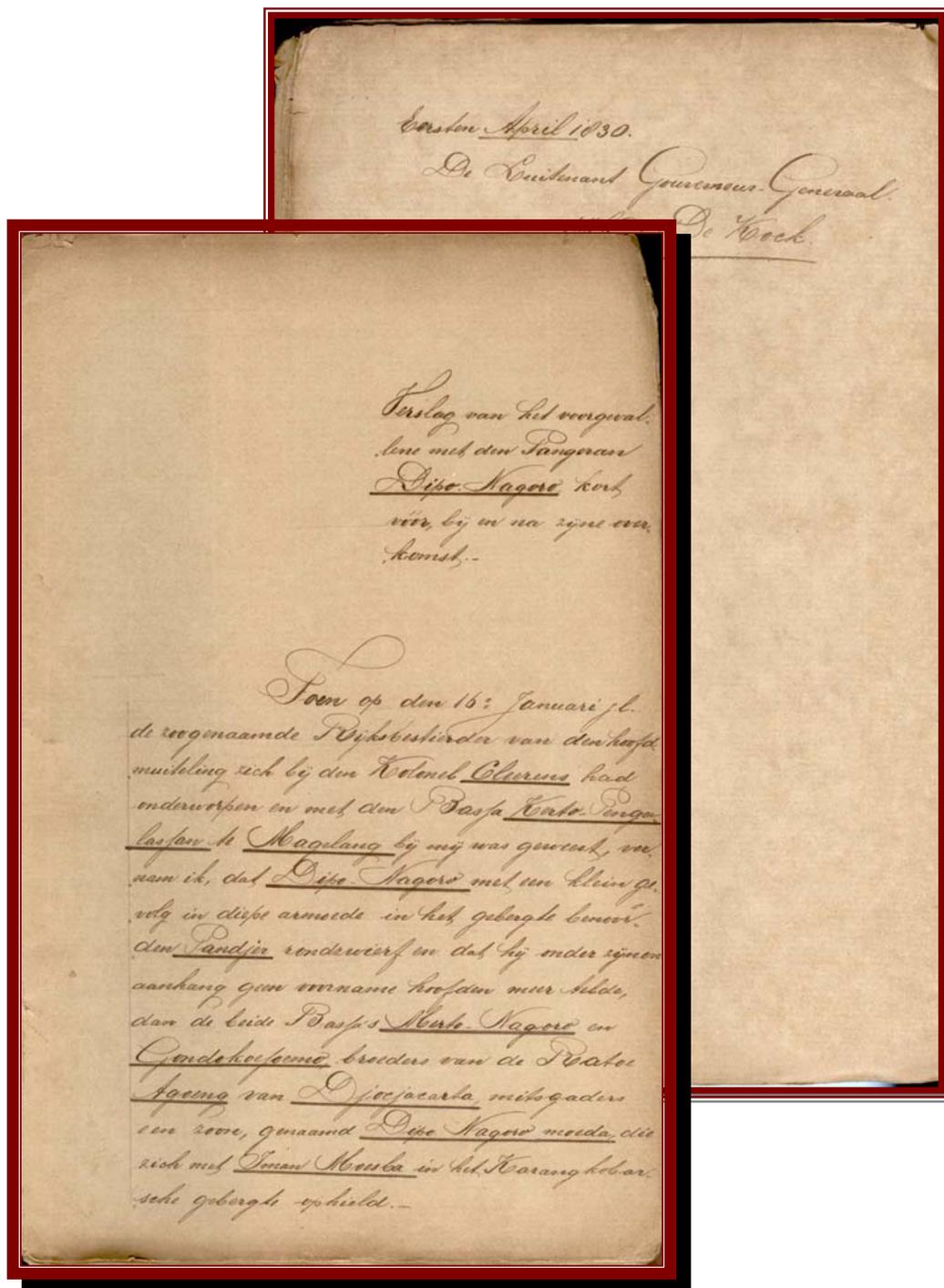
Opzet der gerangcen te bepaling, behoren
 a het het gevolg van King Mojo.

Cudu Djogjocarta

| | | | | | |
|-------------|------------|----------|---------------|-------|--------|
| Sadiman | gencan man | tuca djo | Dumungga | Artid | Meluan |
| Saciman | | | Sembol | | |
| Ejlo gogo | | | Krapak | | |
| Anadngiti | | | konak | | |
| Anas lada | | | Djable ngan's | | |
| Dogog | | | | | |
| Wicwigo | | | Tarpun | | |
| Dogolane | | | Jogolau | | |
| Djawan | | | Kala ngan | | |
| Wicwigo | | | Gewoning | | |
| Anas lada | | | | | |
| Semangala | | | Sipalab | | |
| Wan lasjone | | | Kipadat | | |
| Djawan | | | Lezolan | | |
| Wahiman | | | Wegira | | |
| Winggo | | | gowa ngan | | |
| Winggo | | | | | |
| Wahim | | | | | |
| Sedone | | | Dakem | | |
| Wahim | | | Bada lali | | |
| Djolan | | | Kambangun | | |
| Wahim | | | Sawan | | |
| Djolan | | | Borbanin | | |
| Wahim | | | | | |
| Wahim | | | Karang Patis | | |
| Wahim | | | Djolan | | |

Daftar tawanan pengikut Kyai Mojo di Yogyakarta
 dilaporkan oleh Residen Surakarta, 16 November 1828.

Djokja No. 18-4



Laporan H.W. de Kock mengenai penangkapan
Pangeran Diponegoro di Magelang,
1 April 1830.
Djokja No. 10-5

Lampiran ke: IV.

REPUBLIK INDONESIA

Mami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan Ingkang Simuhun Mangdjeng Sultan Hamengkumuwono, Senapati ing Ngayogyakarta, Abdurrachman Sajidin Panotegone, Kalifatullah Ingkang Kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannja, dengan kepertjajaan, bahwa Seri Paduka Mangdjeng Sultan akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga untuk keselamatan daerah Jogjakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.

Djakarta, 19 Agustus 1945.

Presiden Republik Indonesia,

(Ir. Soekarno).

REPUBLIK INDONESIA

Mami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan Mangdjeng Gusti Pangoran Adipati Sri Paku Alaman ingkang kaping VIII pada kedudukannja, dengan kepertjajaan, bahwa Seri Paduka Mangdjeng Gusti akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga untuk keselamatan daerah Paku Alaman sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.

Djakarta, 19 Agustus 1945.

Presiden Republik Indonesia

(Ir. Soekarno).

Ketetapan Presiden RI (Ir. Soekarno) mengenai Negari
Ngajogjokarta Hadiningrat dan Negari Paku Alaman
sebagai bagian dari Republik Indonesia .
19 Agustus 1945.

Kementerian Dalam Negeri No. 1

Lampiran ke-: I.

A M A N A T

Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjong Sultan.

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjokarta Hadiningrat menjatakan:

1. Bahwa Negeri Ngajogjokarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjokarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjokarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjokarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjokarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.

Ngajogjokarta Hadiningrat

28 Puasa Eho 1876
(5 - 9 - 1945)

HAMENGGU BUWONO.

Lampiran ke-: II.

A M A N A T

Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario

Paku - Alam.

Kami Paku-Alam VIII Kepala Negeri Paku-Alaman, Negeri Ngajogjokarta Hadiningrat:

1. Bahwa Negeri Paku-Alaman, yang bersifat Kerajaan adalah daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku-Alaman dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku-Alaman mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku-Alaman dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Paku-Alaman mengindahkan amanat kami ini.

Paku-Alaman, 28 Puasa Eho 1876
(5 - 9 - 1945)

PAKU-ALAM VIII.

Amanat-amanat tersebut telah ditolegramkan kepada P.J.H. Presiden Republik Indonesia.

Amanat Seri Paduka Ingkang Sinuwun
Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng
Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII mengenai Negeri
Ngajogjokarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman
adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
28 Puasa Eho 1876 (5 September 1945)
Kementrian Dalam Negeri No. 1

KEPUTUSAN-2

KONGRES PEMUDA INDONESIA KE II DI JOGJAKARTA TG. 8-9-JUNI '46.

POLITIK LOUAR NEGERI

1. Menjelenggarakan hooeboengan dengan organisasi2 Pemuda dilouar negeri oentoek memperkoat Kedaulatan Negara Indonesia:
 - a. mengirinkan delegasi2
 - b. mengadakan pedato2 radio
 - c. soerat-menjoerat
 - d. mengoendang Penimpin2 Pemuda Louar Negeri Ke Indonesia.
 - e. mengirina peladjar.
2. Mendesak seepaja Pemerintah Repoeblik Indonesia bertindak tegas terhadap Belanda, sesoeal dengan tindakan Belanda terhadap kita.
3. Kongres Pemuda Indonesia ini memperkoat resoloesi Badan Kongres Pemuda Repoeblik Indonesia tg. 25 April 1946, dan Gaboengan Panitia Penentang Pematjahan Indonesia jang menjatakan:
 - I. Pemuda Indonesia tetap menoaentoet pengakoean kemerdekaan Negara kesatoean Repoeblik Indonesia 100% sekarang djoega.
 - II. Pemuda Indonesia sanggoep dan siap sedia mengerahkan segenap kekoeatannja oentoek menghadapi segala matjam kemoengkinan goena mempertahankan Repoeblik Indonesia serapai akhir zaman.
 - III. Pemuda Indonesia yakin sepenoeh-penoehnja bahwa Pemerintah ta' akan bertentangan dengan 5 futsal Politik Programnja, istimewa jang mengenai kemerdekaan Indonesia boelat 100%.

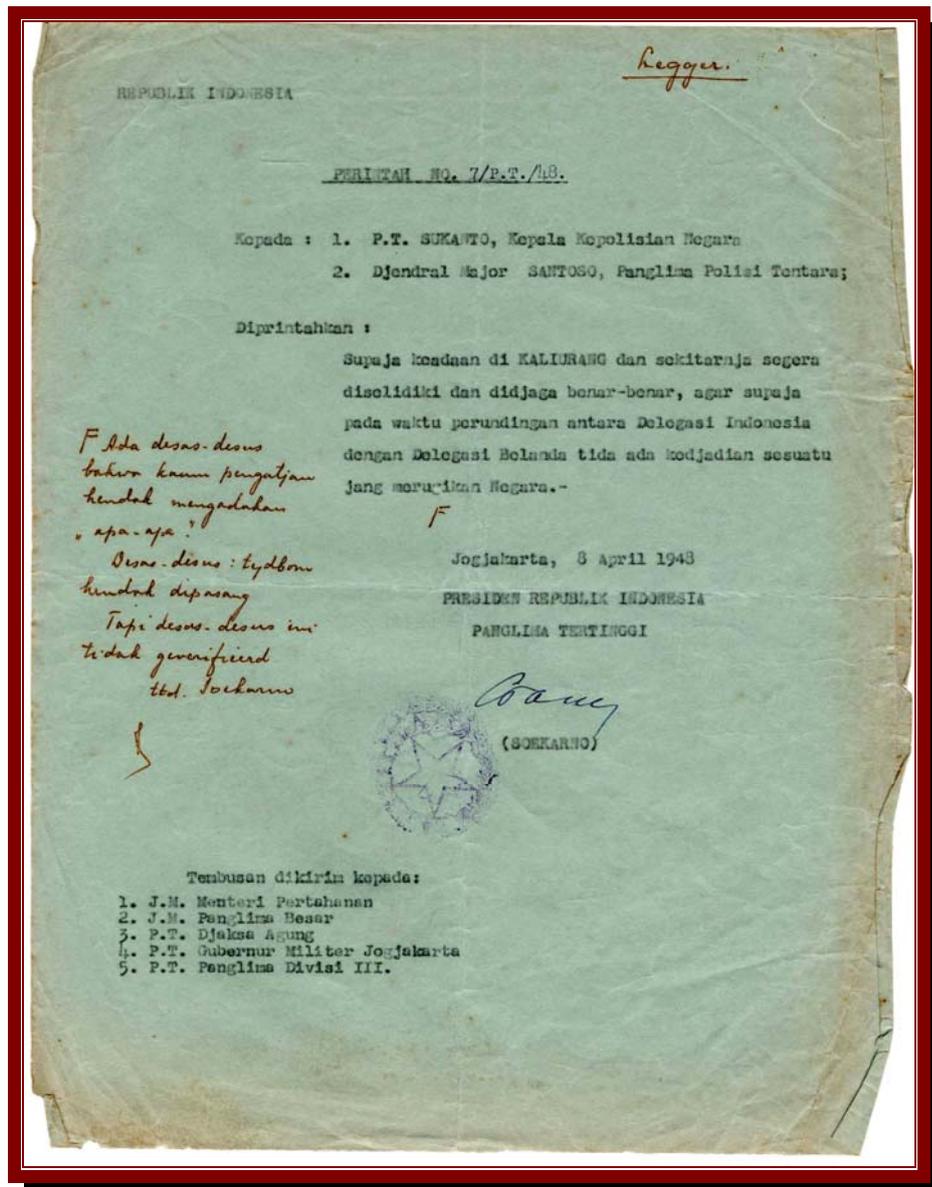
Mengambil Resoloesi seperti tab. dibawah ini:

1. Pemuda Indonesia, jang mempertahankan kemerdekaan negaranja berdasarkan atas kejakinan akan hak "selfdetermination" itoe, sekarang menderita serangan2 militer setjara besar-besaran dan ganas terhadap negara dan bangsa Indonesia jang dilakoeakan oleh pihak Belanda jang hendak mendjadjah Indonesia kembali.
2. Pemuda Indonesia jang tjinta perdamaian dan senantiasa beroesaha mendjaganja, sekarang ini terpaksa mempertahankan diri mati-matian dan telah banjak jang mendjadi korban.
3. Oleh karena itoe Badan Kongres Pemuda Repoeblik Indonesia, setoe organisasi Pemuda jang melipoeti seloeroeh Pemuda Indonesia, menjeroekan kepada segenap bangsa didoenia teroetama kepada Pemudanja jang progressief, agar bersama-sama dapat mewooedjoedkan tjita2 "selfdetermination" bagi tiap2 bangsa, demokrasi dan perdamaian doenia.

J. K. P. 325-11-46.

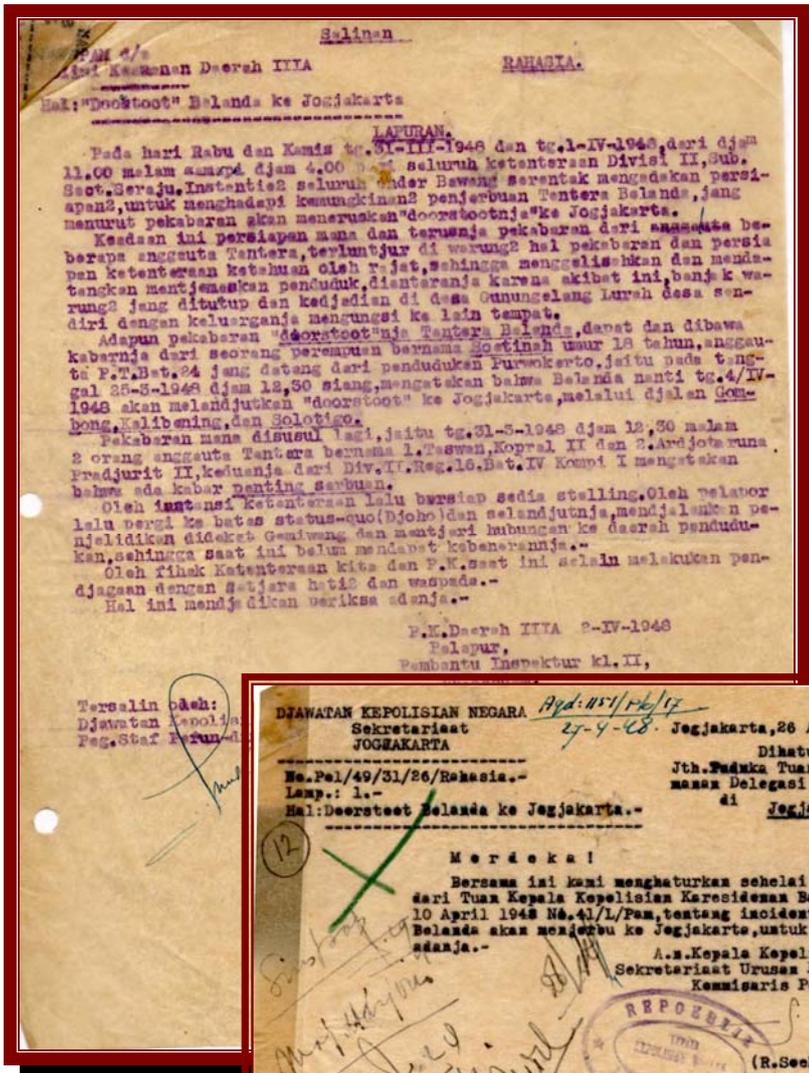
Keputusan hasil Kongres Pemuda Indonesia ke II di Yogyakarta,
8-9 Juni 1946.

Djogja Documenten 51



Surat Perintah Presiden RI kepada Kepala Kepolisian Negara dan Mayor Jenderal Santoso, Panglima Polisi Tentara tentang penjagaan Kaliurang dan sekitarnya selama perundingan Indonesia-Belanda, 12 April 1948

Delegasi Indonesia No. 310



Berita Kepolisian Keamanan Daerah III A (Banyumas) tentang rencana serbuan tentara Belanda ke Yogyakarta 24 April 1948.
Delegasi Indonesia No. 493

SS.

DELEGASI INDONESIA
DJOKJAKARTA.

No. VII/H/21.

NOTULEN
RAPAT KABINET DENGAN
DELEGASI PADA TANGGAL 26/4-1948
DIAM 11.45 SAMPAI
DIAM 14.30 DI
ISTANA PRESIDEN DI
DJOKJAKARTA.

Jang hadir:

| Kabinet: | Delegasi: |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. P.J.M. Wakil Presiden. | 1. Prof. Mr. Soepomo. |
| 2. J.M. Dr. Soekirno | 2. Mr. Ali Boediardjo. |
| 3. J.M. Mr. Soesanto Tirtodiponegoro | 3. Mr. Nasroen. |
| 4. Mr. A.G. Pringgodigdo | 4. Mr. Soedjono |
| 5. J.M. Kasimo | 5. Mr. Thajib. |
| 6. J.M. Dr. J. Leimena | 6. Mr. Masrin. |
| 7. J.M. Koesran | 7. Mr. Soenarjo. |
| 8. J.M. Ir. Djoesand | 8. Mr. Nj. N. Soewondo. |
| 9. J.M. Ir. Laoh | 9. Mr. Asmaoen. |
| 10. J.M. M. H. Hoesin | 10. Mr. Roosdijono. |
| 11. J.M. Sri Sultan. | 11. Lt. Islam Salim. |
| 12. Ir. G. Iskandar | 12. Sutan Sjahrir. |
| 13. Mr. Hoesen | 13. Mr. A.K. Pringgodigdo. |
| 14. Mr. A.G. Pringgodigdo | 14. Soedarpo. |
| 15. Roeslan Abdoelgani | 15. Noesirwan. |
| 16. Mr. Soekardan | 16. Mr. Moh. Roem. |
| 17. Mr. Agoest | 17. Mr. Latuharhary |
| 18. Darmanto | |
| 19. Mr. Soemardi (Skr.Kab.) | Panitia Politik B.P.K.N.I.P. |
| | 1. Mangoensarkoro. |
| | 2. Prawoto Mangkoesamito. |
| | 3. Tedjasoekmana. |

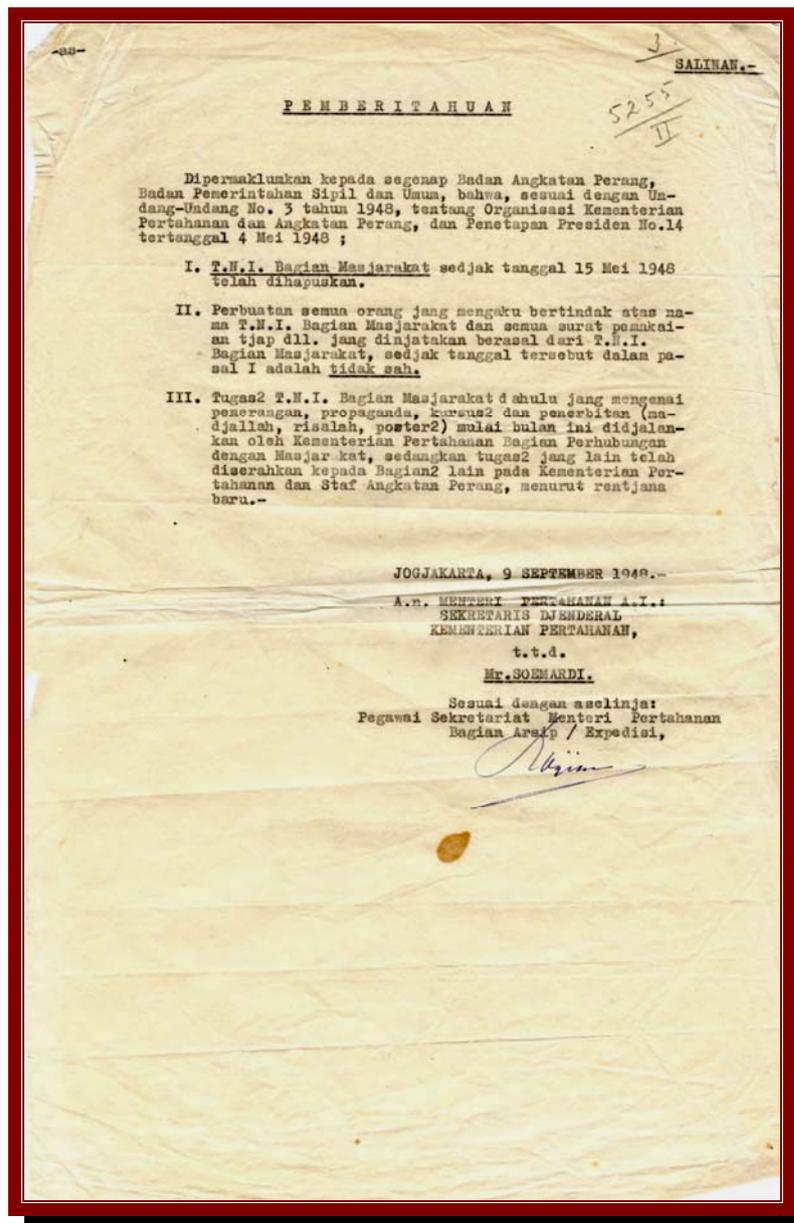
Ketua membuka rapat dan menerangkan bahwa rapat Kabinet bersama dengan Delegasi dan Panitia Politik dari Badan Pekerja ini diadakan untuk meninjau soal3 jang sulit mengenai perundingan dengan Belanda.

J.M. MR. ROEM: Sebagai ketua delegasi memberikan laporan untuk ketiga kalinya, jang terpenting antara lain: Pihak Belanda berpendapat bahwa Republik harus masuk dalam Pemerintah Interim (jang telah dibentuk oleh mereka) dahulu dan kemudian mengadakan pembijaraan selanjutnja. Maksud kita membitjarkan dulu soal2 jang menjadi perselisihan. Maksud ini tertjapai.

Soal2 jang menimbulkan perselisihan jangni:
1. Perhubungan Luar Negeri.
2. Plebisit.
3. Pemerintahan Peralihan.

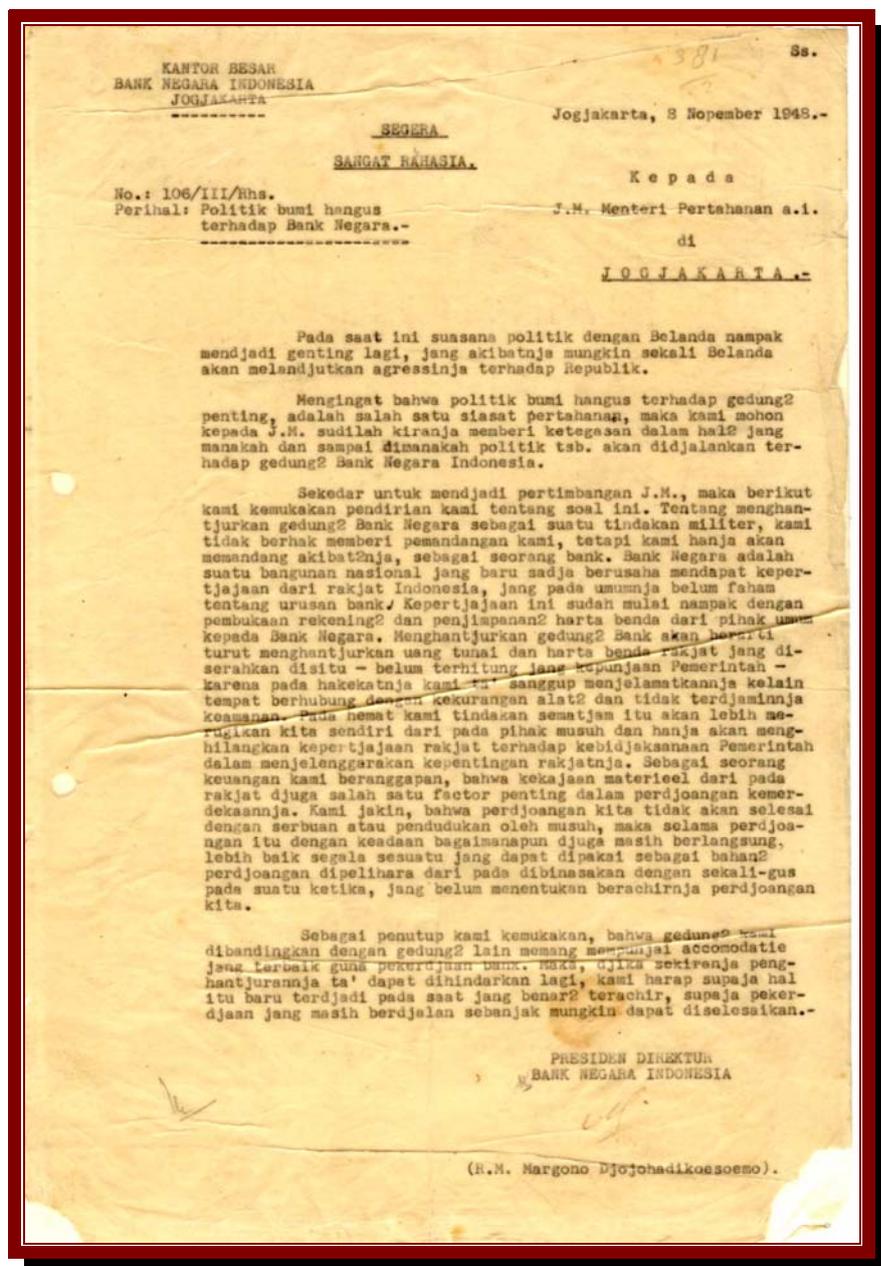
Ad 1.

Notulen Rapat Delegasi Indonesia dengan Kabinet
di Istana Presiden Yogyakarta,
26 April 1948.
Delegasi Indonesia No. 904



Pemberitahuan Sekjen Kementerian Pertahanan tentang tugas-tugas TNI Bagian Masyarakat, 9 September 1948.

Djokja Documeneten No. 25



Politik Bumi Hangus terhadap gedung-gedung BNI,
8 November 1948.

Djokja Documenten No. 125

Jogjakarta, December 16, 1948.

The Hon. Pandit Jawaharlal Nehru
New Delhi.

My dear Nehru:

I avail myself of President Sukarno's visit to India to cement the friendly relations between our peoples to write you this letter in order to give you an idea of the difficulties in which we now find ourselves. I shall only dwell on the fundamental questions because Mr. Sukarno will certainly inform you of all aspects and details of our problems.

The basic cause of our difficulties lies in the fact that the Dutch are unwilling to come to an agreement and are showing a high degree of cunning in attempts to prevent an agreement that may open the door to a truly independent United States of Indonesia. The negotiations that we have been engaged in for three years now, have made it clear to us that the Dutch fear, that an independent Indonesia will deprive them of their economic assets in Indonesia. All measures that they have either taken or proposed so far were designed to safeguard these assets and interests.

They are fully aware that the main strength of the Indonesian movement for independence is the Republic which, at first, embraced Java, Madura and Sumatra with a population of 60 million out of the total of 72 million people who live in the Indonesian archipelago. For this reason, their first aim is to break the strength of the Republic while simultaneously going about the erection of puppet-state organisations in the territory outside the Republic, and, afterwards also in Republican territory which they occupied after the military action launched on July 21, 1947. The Benville Agreement stipulated that the troops of the Indonesian National Army that were left in the pockets of resistance in the occupied areas were to be withdrawn beyond the Status Quo line. But this was not

to

Surat dari Mohammad Hatta kepada Pandit Jawaharlal Nehru
di New Delhi mengenai posisi sulit Indonesia
dalam berurusan dengan Belanda,
16 Desember 1948.

Djokja Documenten No. 14

PERSETUJUAN BERMULAAN

berkenaan dengan kembalinya Pemerintah
Republik ke Djogjakarta.

Statement Delegasi Republik dan statement Delegasi Belanda dalam
pertemuan formil dibawah auspices UNCFI, di Djakarta tgl. 7 Mei 1949,
djam 17.--7 .

I. STATEMENT DELEGASI REPUBLIK.
(Diutjapkan oleh Mr. Moh. Roem).

Sebagai Ketua Delegasi Republik saja diberi kuasa oleh Presiden Sukarno dan Wakil Pbesiden Mohammad Hatta untuk menjatakan kesanggupan mereka sendiri (persoonlijk), sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Djanuari 1949 dan petundjuk2nja tertanggal 23 Maart 1949 untuk memudahkan tertjapainja:

1. pengeluaran perintah kepada pengikut2 Republik jang bersendjata untuk menghentikan perang gerilja;
2. kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan, dan
3. turut serta pada Konferensi Medja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempertjepat penjorahan kedaulatan jang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Sarekat, dengan tidak ber-sjarat.

Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mende-sak supaja politik demikian diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia seickas2-nja setelah dipulihkan di Jogjakarta.

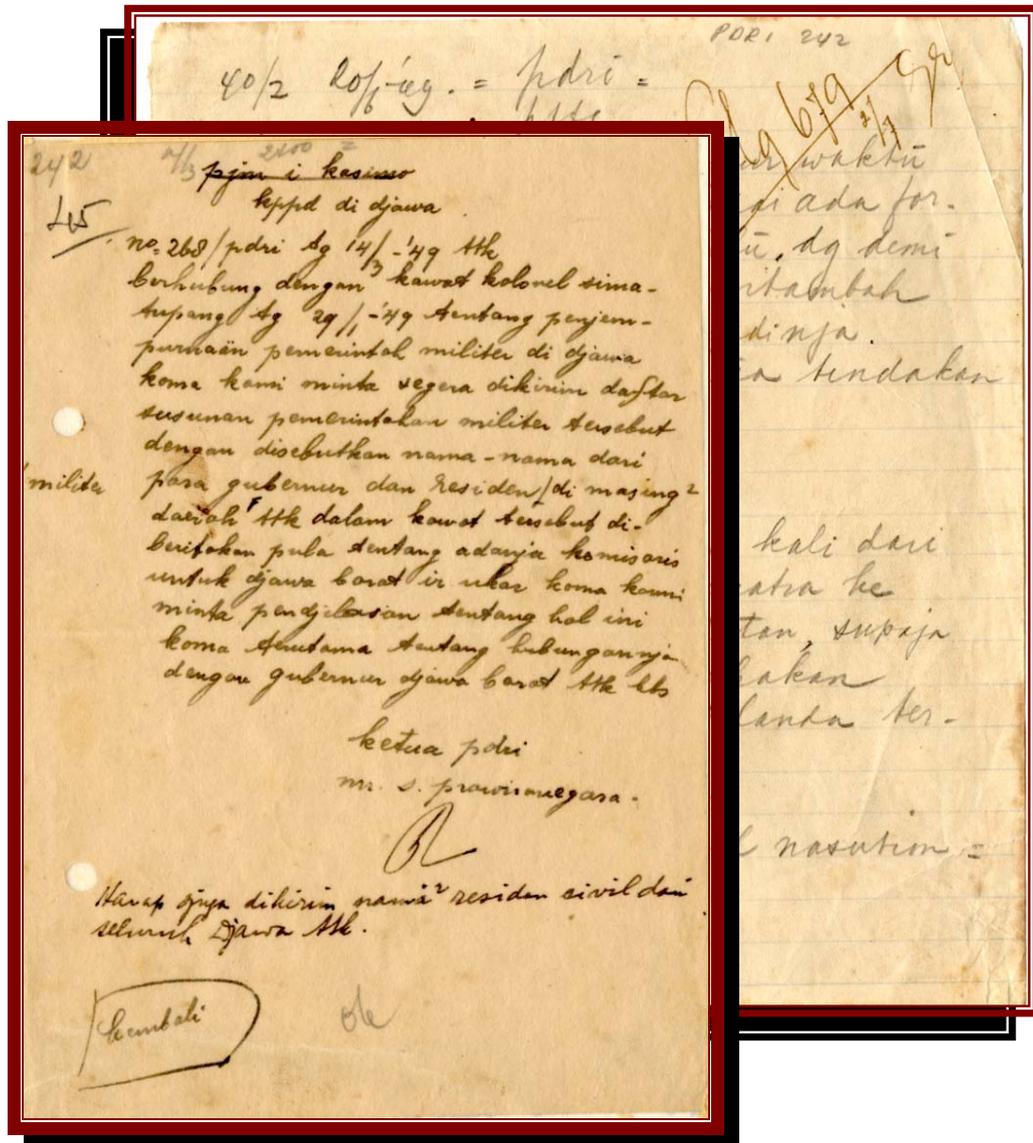
II. STATEMENT DELEGASI BELANDA.
(Diutjapkan oleh Dr. van Royen).

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menjatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan jang baru saja diutjapkan oleh Mr. Roem, ia menjetu-djui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta. Dele-gasi Belanda selandjutnja menjatudjui pembentukan satu panitia-ber-sama atau lebih dibawah auspices UNCFI dengan maksud :
 - a. mengadakan penjelidikan dan persiapan jang perlu sebelum kembali-nja Pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta.
 - b. mempeladjadi dan memberi nasihat tentang tindakan2 jang akan di-ambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilja dan kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan.
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah Republik Indonesia ha-rus bebas dan leluasa melakukan djabatannja jang sepatutnja dalam satu daerah jang meliputi Karesidenan Jogjakarta dan bahwa ini ada-lah satu langkah jang dilakukan sesuai dengan maksud petundjuk2 De-wan Keamanan tanggal 23 Maart 1949.
3. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannja untuk men-djamin penghentian segera dari pada semua gerakan2 militer dan men-bebaskan dengan segera dan tidak berajarat semun tahanan politik jang ditangkapija sedjak 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.
4. Dengan tidak mengurangi hak bagian2 bangsa Indonesia untuk menentu-kan nasibnja sendiri sebagai jang diakui dalam azas2 Linggadjadi dan Renville, Pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau menga-kuui negara2 atau daerah2 diatas daerah jang dikuasai oleh Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merukikan daerah Republik tersebut.

5.

Surat persetujuan pertama pengembalian Yogyakarta dan
penjelasan singkat dalam kaitan Perundingan Roem Royen,
7 Mei 1949.

Delegasi Indonesia No. 964



Telegram Ketua PDRi Mr. Sjafrudin Prawiranegara
tentang Susunan Pemerintahan Militer,
14 Maret 1949.
PDRi No. 242



Panglima Besar Soedirman didampingi Letkol Soeharto tiba di Yogyakarta disambut oleh Kolonel Suhud dan para perwira lainnya.
Kempen 130 A (1949)



Hamengku Buwono IX menyambut kedatangan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta kembali dari pengasingan.
Kempen 169 (1949)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

J.M. Panglima Besar.

Adinda Sudirman,
Assalamualaikum w.w.!

Dinda,
Djika ditaksirka, Tuhan, saja besok pagi dengan keluarga pindah ke Djakarta. Sebenarnya saja tadinya bermaksud panjitan kepada Dinda octjara direct, ^{ini part} ketapi sekunjung-kunjung datanglah hal-hal penting jing harus saja selesaitka, sebelum saja meninggalkan Djaja, sehingga terpaksaalah saja panjitan kepada Dinda dengan surat ini sadja, — dengan hati jing berat.

Dinda, Dinda tahu prasaan Kanda terhadap kepada Dinda. Hbaratnja, hatiku ini adalah kitab jing terbuka

21 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

dihadapan Dinda. Politikpun Kanda satu buku jing terbuka bagi Dinda. R.T.S. jing kita tjapai sekarang ini, bukannya budjara, kita jing terakhir. R.T.S. kita pakai sebagai alat untuk menentukan usaha dan perdjangan kita. Dalam usaha dan perdjangan jing masih dihadapan kita itu, Kanda masih membutuhkan tenaga atau fikir, Dinda. Karena itu Kanda mengharap supaya Dinda tetap memberi bantuan itu kepada Kanda.

Banjak kechilafan Kanda sebagai manusia, — djuga terhadap Dinda. Karena itu, pada saat saja akan meninggalkan Djaja ini, saja minta supaya Dinda suka memaafkan segala kechilafan atau kesalahan Kanda itu. Maafkanlah dengan ikhlas!

21 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Kanda do'akan kepada Tuhan, mooga Dinda sigra sembuh. Dan mohonkanlah djuga, supaya Kanda didalam Djakarta, baru ini selalu dipimpin dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Manusia ta' berkuasa suatu apa, hanya Dia-lah jing menentukan segala-gala.

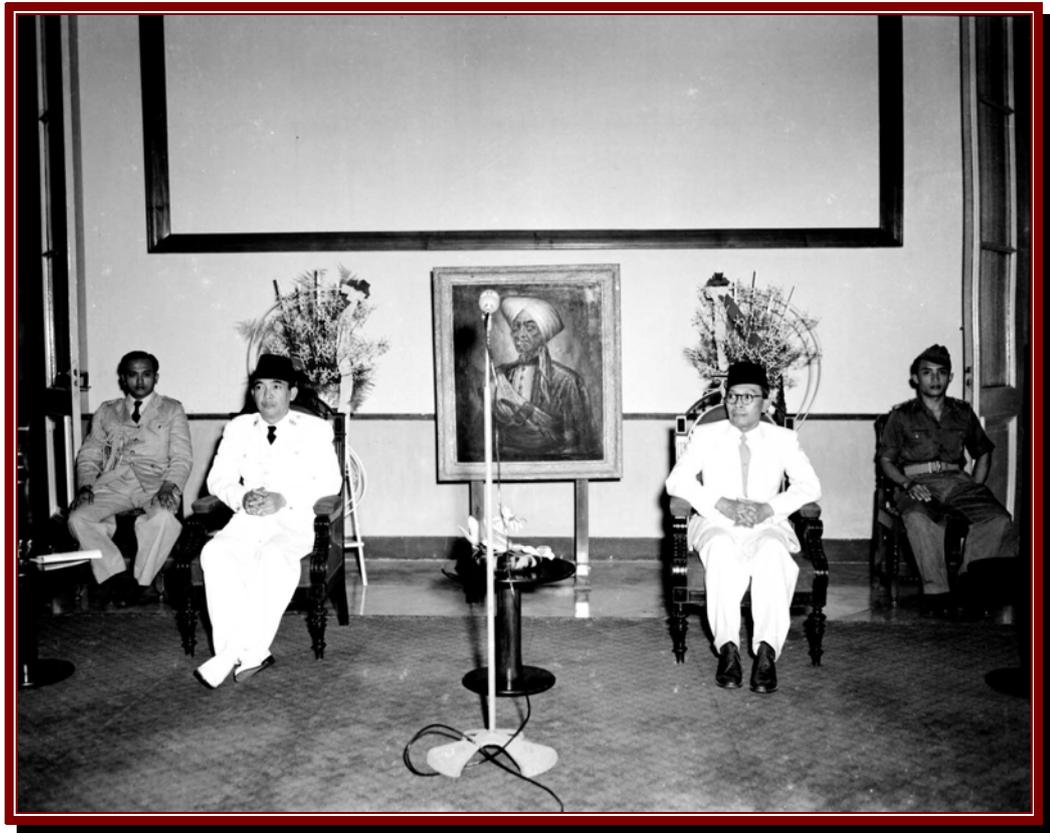
Sampaikanlah djuga salam ta'jiz isteriku kepada Kuo Dirman. Heteriku pun minta diberi banjak maaf, dan do'a kepada Tuhan.

Sekian, sudaraku!
Merdeka!
A. Achardus.
27/12 '49

Surat Bung Karno kepada Jenderal Sudirman menjelaskan posisi politik yang diambil mengenai RIS.

27 Desember 1949

ANRI



Presiden Soekarno dan Mr. Asaat pada saat penyerahan
Pemerintah RI di Istana Kepresidenan.
Kempen 50059 (12-15 Agustus 1950)



Presiden Soekarno memberi selamat perpisahan kepada
Dr. Radjiman di Lapangan Terbang Maguwo, Yogyakarta.
Kempen 50038 (12-15 Agustus 1950)



Upacara penyerahan Pemerintah Republik Indonesia di Istana Presiden, Presiden Soekarno sedang berpidato pada sidang BP KNIP pada waktu penyerahan RI kepada NKRI.
Kempen 50018 (12-15 Agustus 1950)



Upacara penyerahan Pemerintah RI di Istana Presiden, Dr. Abdul Halim menyerahkan kembali mandatnya kepada Mr. Asaat.
Kempen 50051 (12-15 Agustus 1950)



Masyarakat Kab. Gunung Kidul sedang antri
untuk melakukan pemilihan umum.
Kempen 5 (29 September 1955)



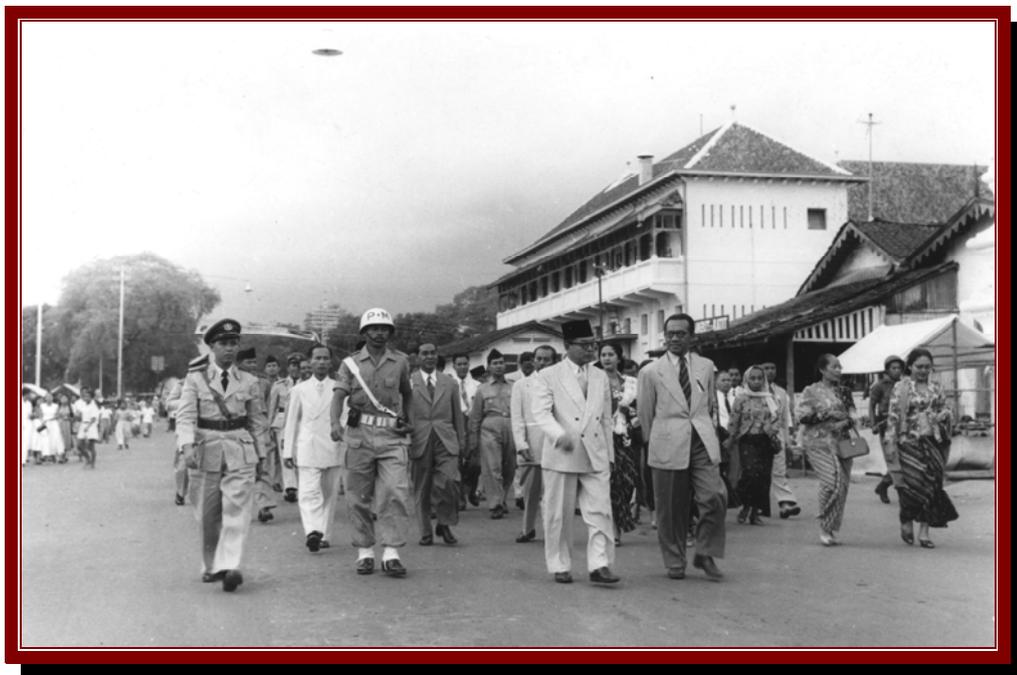
Kantor Panitia Pemilihan Kota Pradja Yogyakarta,
tampak petugas keamanan sedang berjaga-jaga.
Kempen 5 (29 September 1955)



Pemilu untuk Konstituante Kabupaten Gunung Kidul.
Kempen (15 Desember 1955)



Perayaan 17 Agustus 1956 di Gedung Negara Yogyakarta.
Kempen 7



Wakil Presiden Moh. Hatta tiba di Yogyakarta untuk menghadiri
peringatan 200 tahun Yogyakarta.
Kempen (6 Oktober 1956)



Mr. Ali Sastroamidjojo berpidato pada acara peringatan
200 tahun Yogyakarta.
Kempen (6 Oktober 1956)



Seorang wanita sedang memasukkan kartu pemilihnya ke dalam kotak suara dalam pemilihan DPRD Yogyakarta.

Kempen 32 (7 November 1957)



Para Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul bergambar bersama
dimuka pendopo sesudah pelantikan di Yogyakarta.
Kempen (10 Februari 1958)



Rapat umum mendukung rencana Dekrit Kembali Ke UUD'45
di Yogyakarta.
Kempen (19 April 1959)



Presiden Soekarno menandatangani Naskah Trikora
di Yogyakarta.

Kempen 611219 GM 24 (19 Desember 1961)



Amanat Presiden Soekarno pada Rapat Trikora di Yogyakarta.
Kempen 611219 GM 23 (19 Desember 1961)

PENJELASAN SOEHARTO TAHUN 1966

Perwira-perwira Staf dari Sejarah Militer, Inshaallah apa yang dibutuhkan oleh saudara mengenai beberapa keterangan yang menyangkut suatu peristiwa serangan 1 Maret terhadap kedudukan Belanda pada waktu itu yang menduduki Ibukota RI ialah Yogyakarta akan saya usahakan sepanjang apa yang masih dan saya ingat disebabkan karena sudah beberapa tahun hingga sekarang, kalau tidak salah ialah sudah 17-an tahun. Dengan demikian apa yang saya berikan kemungkinan ada beberapa soal yang sudah saya lupa, namun akan saya usahakan agar supaya secara garis besarnya dapat diketahui benar-benar akan maksud dan tujuan dari serangan 1 Maret 1949 yang kita lakukan terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta untuk dapat memberikan gambaran dan keterangan-keterangan tersebut, maka perlu diketahui kejadian-kejadian sebelumnya, khususnya mulai saat-saat atau waktu yang sangat mengejutkan kita ialah peristiwa pada tanggal 19 Desember 1948 itu sendiri. Saya sebagai salah seorang Perwira mendapat kepercayaan untuk memegang Be X. Kalau tidak salah namanya pada waktu itu ialah memegang Komando atas beberapa Batalyon Infanteri dan Batalyon Bantuan.

Tugas kami selaku pimpinan Be X dengan segenap Slogordinya ialah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan serangan Belanda dari sebelah Selatan ialah meliwati Corridor Gombong, sehingga pasukan-pasukan dari Be X pada saat tersebut memang sudah ditempatkan mulai dari pertahanan Kebumen sampai kepada daerah pertahanan Purworejo dan Wates. Be X sendiri tidak diserahi tanggung jawab pertahanan di Ibukota Yogyakarta, yang pada waktu itu adalah diserahkan kepada Komando Militer Kota KMK yang dipimpin oleh Kol. Latief atau Overste Latief pada waktu itu Latief Indraningrat. Pertahanan di Ibukota sendiri adalah langsung dipimpin oleh Markas Besar Tentara MBT sehingga dapat dikatakan mengenai persiapan pertahanan di kotanya sendiri adalah saya tidak mempunyai tanggung jawab langsung.

Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa Kesatuan Be X adalah bertanggung jawab atas kemungkinan serangan Belanda yang meliwati Corridor Gombong dan juga bertahan diluar Ibukota Yogyakarta. Jadi pada saat tanggal 19 Desember 1948 pasukan-pasukan dari Be X dapat dikatakan inget digeris depan, saya sendiri tidak mempunyai pasukan kecuali Markas dan juga Kompi Pengawal dan sebagian kecil dari Kie dan Bn² atau Kie Bn Bantuan sehingga pada kejadian tersebut benar-benar merupakan suatu pendudukan tidak hanya bagi Be X tapi juga merupakan pendudukan bagi Kesatuan atau TNI pada umumnya atas serangan Belanda terhadap Ibukota Yogyakarta itu. Walaupun kami tidak mempunyai pasukan hanya dengan pasukan

kecil

Naskah salinan penjelasan Letnan Jenderal Soeharto kepada Perwira Staf Sejarah Militer mengenai beberapa keterangan yang menyangkut peristiwa Serangan Umum, 1966.

Jamal Marsudi No. 123

SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN SRI SULTAN HAMENGKU
BUWONO IX TAHUN 1973 PADA PERESMIAN MO-
NUMEN SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 DI
YOGYAKARTA

Bapak Presiden, Ibu Tien Soeharto, para Menteri, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian.

Kami sekedar melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa tadi malam telah hadir pada pembukaan yang resmi daripada Mesjid Saka Tunggal di Tamansari.

Pada waktu kami diminta perijinan membuat mesjid itu dengan segera kami telah memberikan ijin, oleh karena bagaimanapun juga mesjid yang megah itu menjadi monumen juga monumen perjuangan, oleh karena pada tempat itu pada waktu pendudukan Belanda banyak daripada anak-anak kita yang divisioleer ditempat disekitar mesjid itu. Maka dengan demikian alah kadarnya kita disini memberikan hormat dan menyampaikan terimakasih kita pada arwah-arwah pahlawan-pahlawan kita.

Bapak Presiden, Ibu Tien, Saudara-saudara sekalian.

Banyak yang menanyakan kepada saya mengenai riwayat daripada 1 Maret dan mengapa 1 Maret itu terjadi. Maka sekaligus disini kami akan memberikan jawabannya, akan tetapi kita harus mulai pada waktu kira-kira 2 minggu sebelum Belanda menyerbu di Yogyakarta ini. Pada waktu itu kami dipanggil oleh Pak Dirman dimana saya diberitahukan bahwa keputusan daripada Pemerintah, andaikata ada penyerbuan daripada Belanda di Yogyakarta maka saya harus tetap di kota Yogya, dengan memikul resiko nya.

Sudah barang tentu jawaban kami, kalau itu sudah menjadi keputusan Pemerintah maka saya akan menunaikan tugasnya, tugas saya sebaik-baiknya. Maka terjadi penyerbuan daripada Belanda yang dinamakan Polisionil Aksi ke II dan semangat daripada rakyat pada umumnya berkobar-kobar, akan tetapi saudara-saudara sekalian, padahal setiap perjuangan itu baik turun.

Maka pada kira-kira akhir Januari kami mendapat berbagai laporan bahwa semangat daripada rakyat di kota ini agak mengendor. Sudah ada keluhan-keluhan terhadap anak-anak kita yang melakukan tugas dari luar kota. Oleh karena itu maka saya sangat khawatir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sudah barang tentu hal ini juga pihak musuh membakar-beker agar supaya adanya suatu terjadi sesuatu yang antara rakyat kita dengan anak-anak yang sudah berjuang.

Maka pada

Naskah salinan pidato sambutan Wakil Presiden Sri Sultan
Hamengku Buwono IX pada peresmian Monumen Serangan Umum
1 Maret 1949 di Yogyakarta,
1973.

Jamal Marsudi No. 124

KESAN-KESAN DAN TANYA JAWAB PERS DENGAN
KESAD LETJEN TNI WIDODO, WAKTU BELIAU
MASIH MENJADI KASKODAM VII/DIPONEGORO

Pertanyaan : Sekitar status jabatan Jenderal dekat sebelum, semasa dan sesudah Serangan Umum (S.O.) 1 Maret 1949 ?

Jawaban : Sebelum tanggal 1 Maret 1949, jabatan saya adalah sebagai Dan Ki Yon I Res 22 (Bat. Mayor Sardjono, Komandan Res 22 adalah Let. Kol. SOEHARTO). Sesudah 1 Maret saya masih berada di Yon tersebut kemudian pindah ke Yon 410 yaitu Yon Mayor Daryatmo, selanjutnya pindah ke Yon 412 dan menjabat sebagai Dan Yon.

Pertanyaan : Sekitar jumlah kekuatan pasukan termasuk tugas-tugas dan daerah pasukan yang ada dibawah pimpinan Jenderal pada waktu itu.

Jawaban : Dalam clash, Kompi saya adalah Kompi besar dengan kekuatan 400 orang bertempat di daerah SWK 102/Selatan, tetapi ditunjuk sebagai pasukan ekspedisi dipimpin langsung oleh Pak Harto. Setelah melaksanakan ekspedisi keliling kota Yogyakarta, saya dipindahkan ke SWK 103 A dalam rangka menghadapi Kahar Muzakar cs yang pada waktu itu berada di Yogyakarta Barat. Dus untuk mengatasi persoalan ini. Setelah 1 Maret saya taktis langsung dibawah SWK III dan bisa mendapat perintah langsung seperti halnya pada saat menjelang Cease Fire menghadang di Sektor Medari, Sleman dengan hasil dapat menghancurkan 1 Pantsergon dan beberapa buah truk.

Pertanyaan : Berapa jumlah kekuatan pasukan kita dalam menghadapi S.O. 1 Maret 1949 ?

Jawaban : Kekuatan kita sebelum 1 Maret untuk menyerang kota Yogya personil ± 2.000 orang yaitu terdiri dari pasukan SWK 102, 103 (Barat), 104 (Utara), 105 (Timur). Disamping itu ada bantuan 1 Ki dari Yon Daryatmo dari Kedu yaitu Ki Suwarno yang saya jumpai.

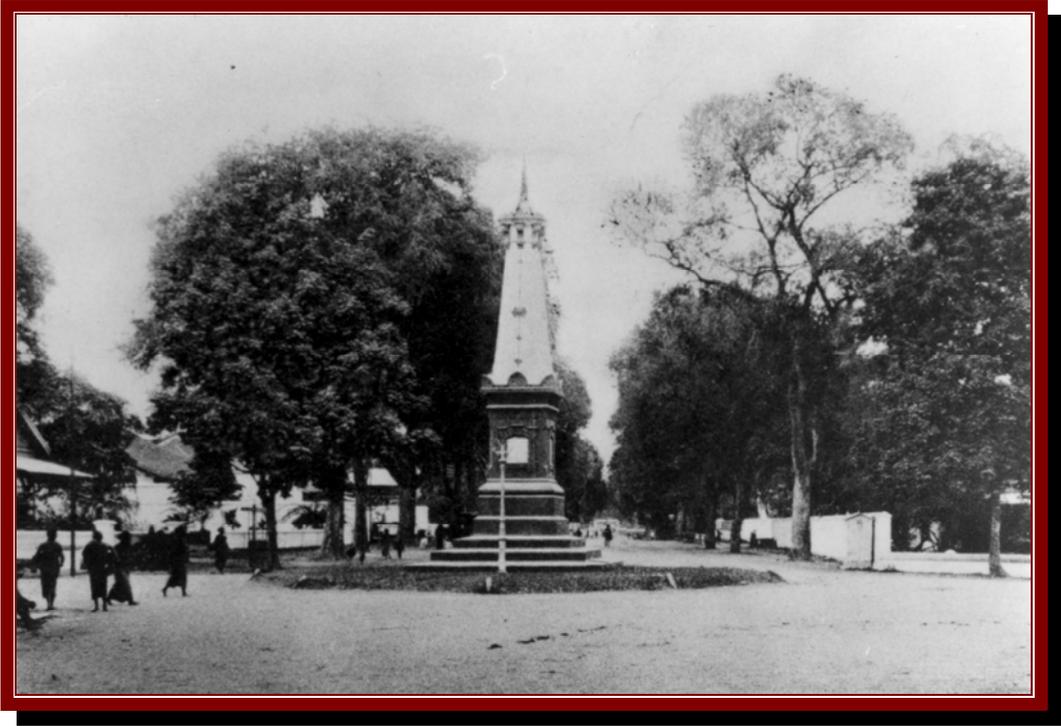
Naskah salinan tentang kesan-kesan dan tanya jawab pers dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen Widodo sewaktu menjabat Kasdam VII Diponegoro mengenai Serangan Umum 1 maret 1949.

Jamal Marsudi No. 126

Bangunan Bersejarah



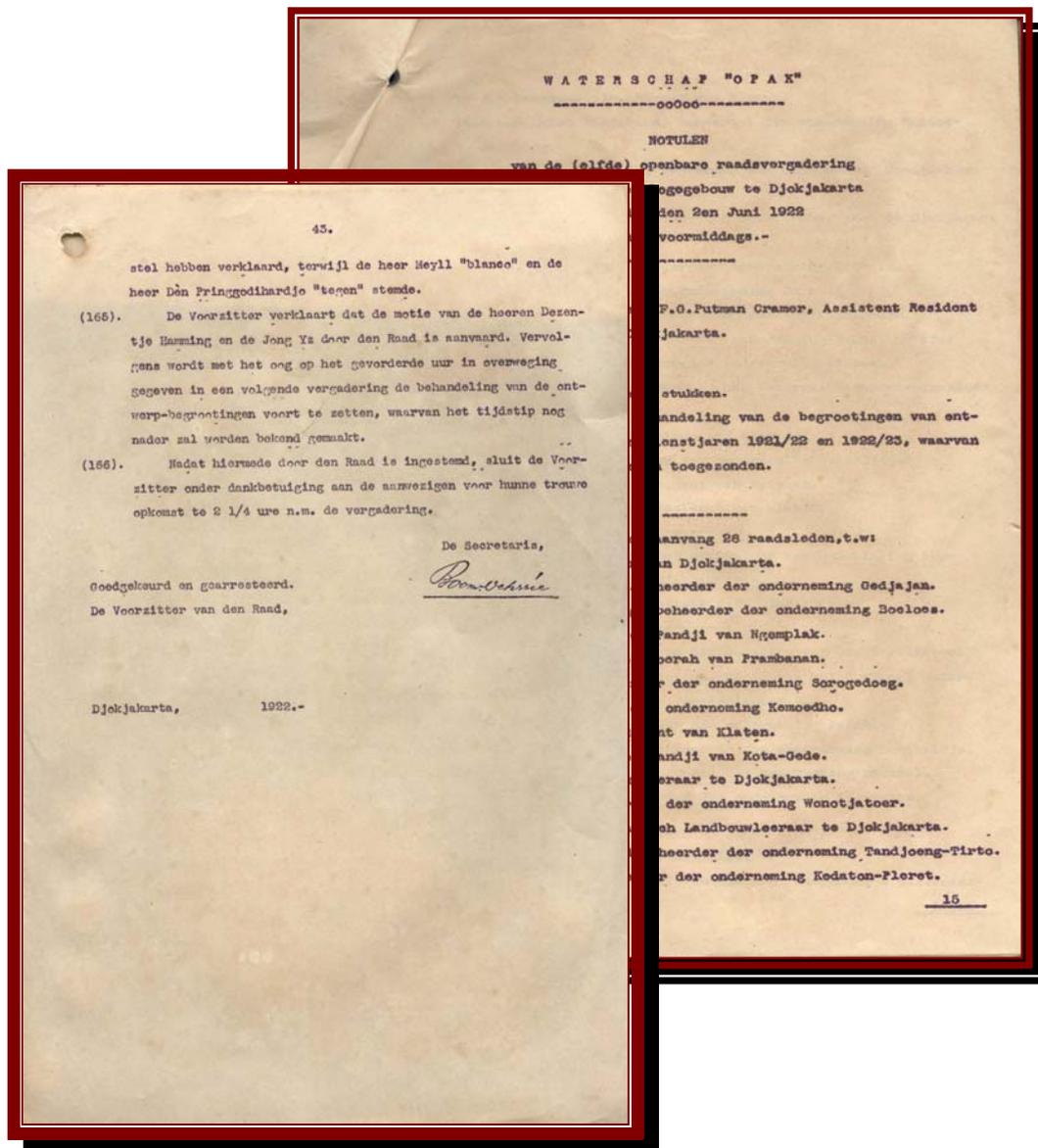
Gerbang utama Benteng Vredenburg di Yogyakarta.
KIT 1107-1 (1896)



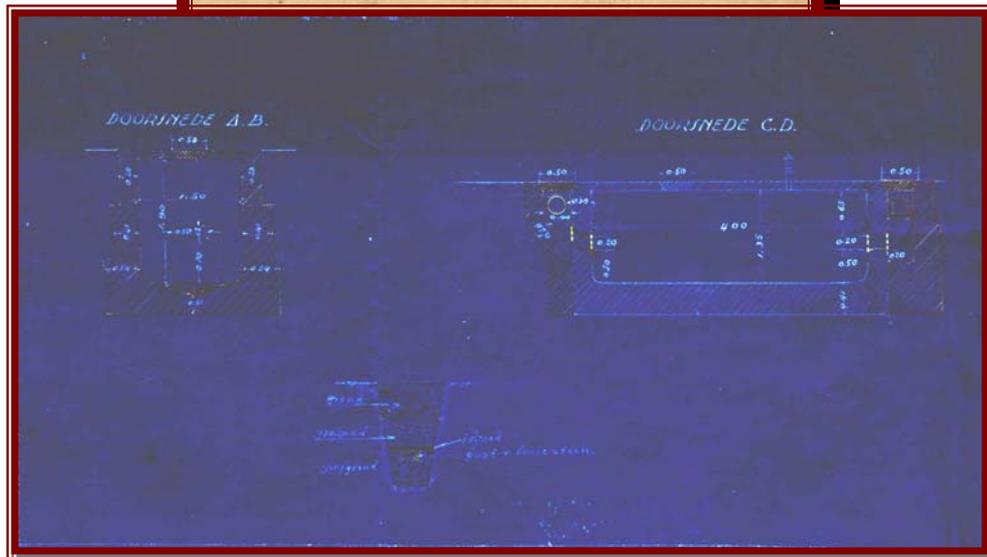
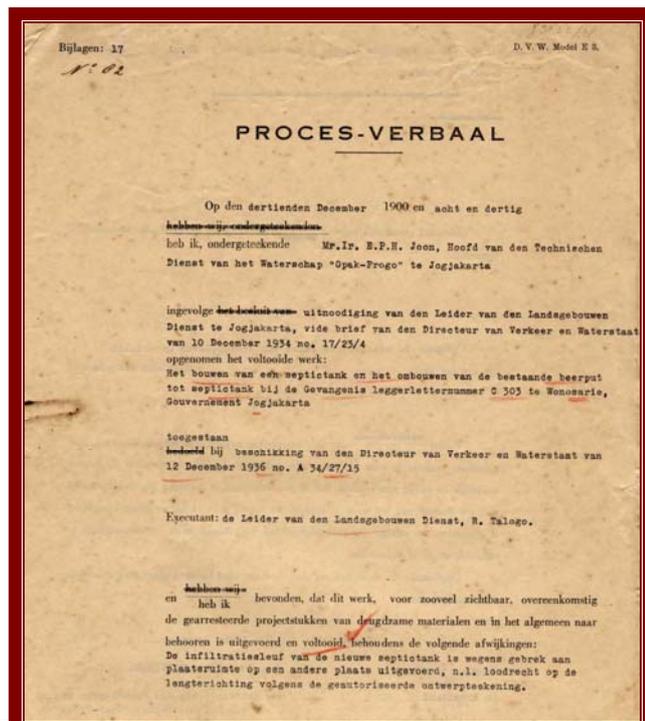
Tugu Malioboro, Yogyakarta.
KIT 1106-28 (1920)



Pintu Plengkung Asem di Yogyakarta.
KIT 1106-58 (1920)



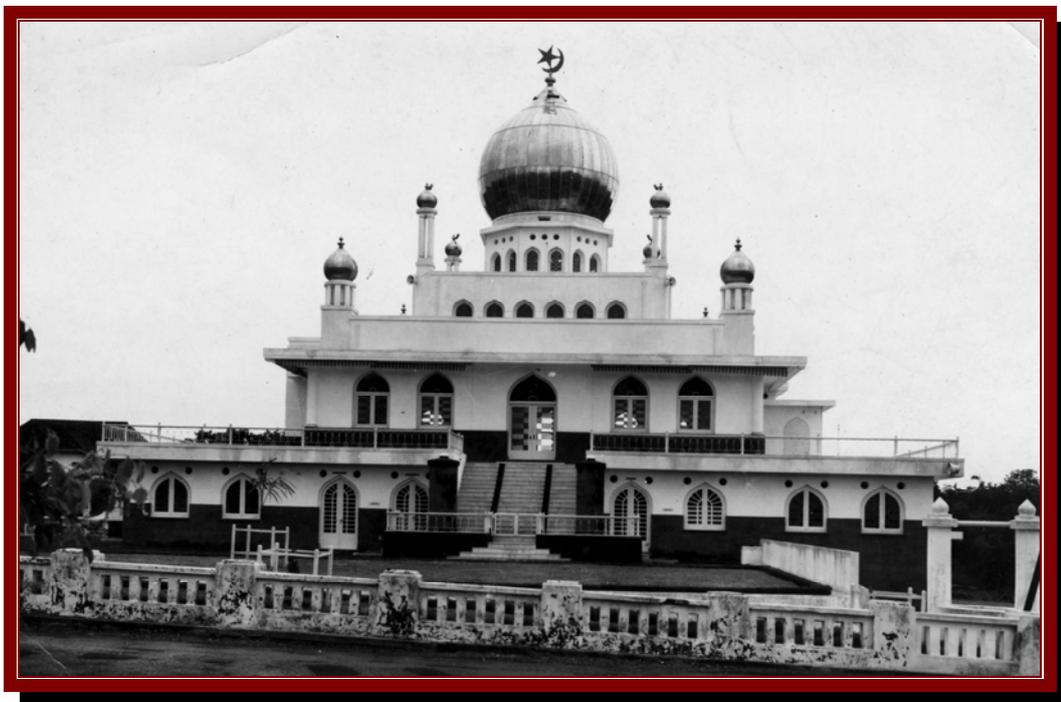
Notulen rapat masalah pengairan
dari Kali Opak Yogyakarta, 2 Juni 1922.
BOW No. EV-89



Pemeliharaan rumah tahanan Wonosari Yogyakarta, 1941.
BOW No. AX-101



Gereja Katholik di Panembahan, Yogyakarta.
Kempen 513770 (20 Mei 1951)



Masjid Syuhada di Yogyakarta.
Kempen 521117 GM 1 (17 November 1952)



Gedung Negara Yogyakarta.
Kempen 530817 GM 3-2 (17 Agustus 1953)



Gedung Taman Siswa di Yogyakarta.
Kempen 590429 GM 41(29 April 1959)

Pendidikan



Peresmian Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Istana Presiden,
nampak Prof. Sardjito tengah memberi pidato.
Kempen 50042 (12 Agustus 1950)



Presiden Soekarno memberikan kata sambutan setelah menerima surat tanda promosi *Honoris Causa* sebagai Doktor baru.
Kempen 510919 GM 10 (18 – 23 September 1951)



Paduka Yang Mulia Dr. Ir. Soekarno menerima pemberian selamat
dari Presiden Universitas Gadjah Mada
Dr. Notonegoro di Ruang Resepsi Pagelaran.
Kempen 510919 GM 17 (18 – 23 September 1951)



Peletakan batu pertama Universitas Negeri Gadjah Mada oleh
Presiden Soekarno di Yogyakarta.
Kempen 40 (10 Januari 1952)



Gedung Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.
Kempen 6 (1952)



Pembukaan Gedung Asrama Ratnaningsih untuk para mahasiswa UGM, nampak Presiden Soekarno bersama-sama Menteri PP&K, Mr. M. Yamin melihat ruang asrama.

Kempen 541219 GM 19 (19 Desember 1954)



Wakil Presiden Moh. Hatta diiringi oleh para penyambut menuju aula tempat upacara pemberian gelar *Doktor Honoris Causa* di Universitas Gadjah Mada.
Kempen 561127 GM 1(27 November 1956)



Pemberian *Doktor Honoris Causa* kepada Ki Hajar Dewantara oleh Presiden Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sardjito, bertepatan dengan Dies Natalis ke VII Universitas Gadjah Mada.
Kempen 54 (19 Desember 1956)



Penyerahan Buku Windon Daerah Provinsi Seluruh Indonesia oleh Kepala Pendagri Kempen Darjono kepada DR. Ki Hajar Dewantoro, di Yogyakarta.

Kempen 3 (2 Nopember 1957)

TRANSLATION

GENERAL LECTURE BY HIS EXCELLENCY PRESIDENT
SUKARNO AT THE GADJAH MADA UNIVERSITY IN
JOGJAKARTA ON THE 28TH OF MAY 1958.

In connection with my visit to Jogjakarta for the official opening of the sugar factory Madu Kismo, I have been invited to deliver a lecture to the students of Gadjah Mada University, on the theme of the duty and role of the students in the national revolution.

I feel extremely happy to deliver this lecture in Jogjakarta, the historical city with the biggest centre of students life in the whole of Indonesia.

I said "the historical city", because this city was the centre of our revolution since the beginning of 1946 till the end of 1949.

Jogjakarta is sometimes also called the city of Pilgrimage, x) because the Central Government of the Republic of Indonesia which was proclaimed on the 17th of August 1945 moved from Jakarta to Jogjakarta on the 4th of January 1946. There is only one city which qualifies for the name of "City of Pilgrimage", and that is Jogjakarta. As we recognise only one proclamation of independence, not two, three or four, similarly we know only one "City of Pilgrimage", and that is Jogjakarta. Indeed, there are those who call Padang, Bukittinggi or Manado the city of Pilgrimage. But there is only one "City of Pilgrimage", — Jogjakarta!

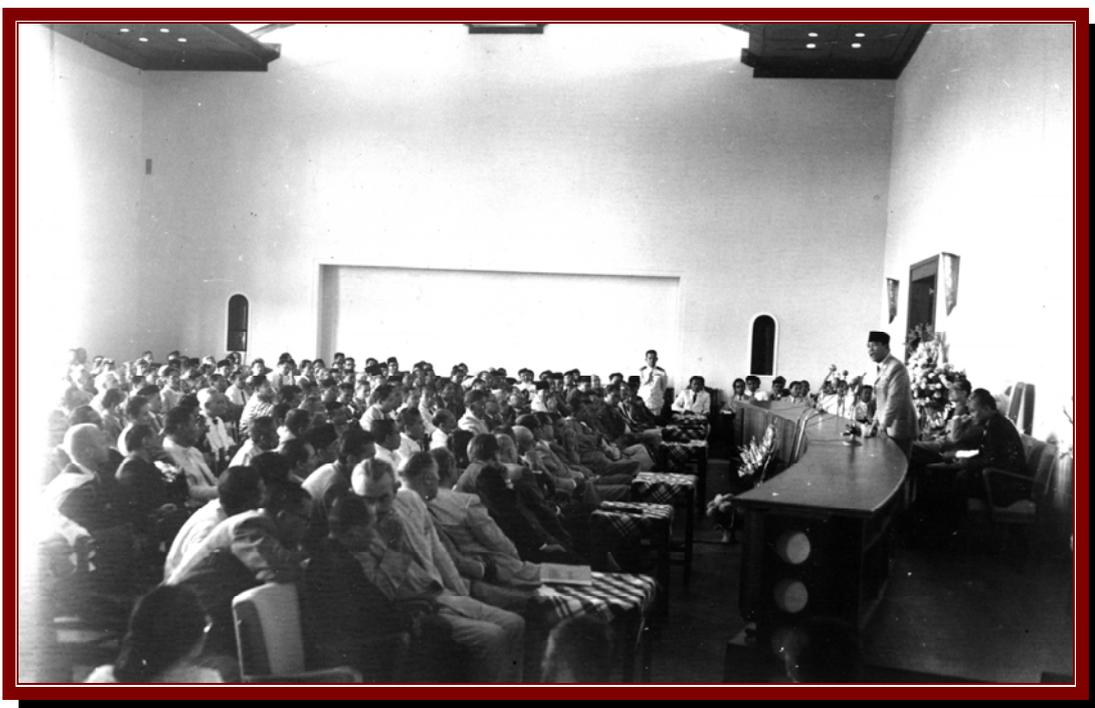
I was asked this evening to give a lecture on the duty and the role of the students in the national revolution.

You all know what the word "revolution" means. Do not apply the narrow meaning to the word "revolution". Let us consider the term "revolution" in its wider sense.

When

x) Pilgrimage is not a correct translation of Hidjrah. Hidjrah means a "cutting-off of ties", a "moving to another place".

Kuliah umum oleh Presiden Soekarno di Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, 28 Mei 1958.
Pidato Presiden No. 928



Presiden Soekarno sedang memberikan wejangan pada saat
meresmikan Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada.
Kempen 591219 GM 6 (19 Desember 1959)



Gedung Universitas Gadjah Mada dilihat dari depan.
Kempen 591219 GM 11 (19 Desember 1959)



Penyerahan buku Pelayanan Semesta oleh Prof. M. Yamin kepada
Presiden UGM, Prof. Dr. Sardjito di Gedung Negara.

Kempen 1 (19 Desember 1960)

PERSYARIKATAN : GERAKAN DA'WAH ISLAM
M U H A M M A D I Y A H
8 Ds. Hijjah 1330 H
Didirikan pada : 18 Desember 1912 H

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : A-1/01.E/PW/1981.

tentang : Pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setelah :

- Memperhatikan :**
1. Kesimpulan pembicaraan dalam Sidang Pleno PMW DIY pada tg. 14-12-1980 tentang Peradapan Pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 2. Kesimpulan Pembicaraan dalam Sidang Bersama PMW DIY & PP - Muhammadiyah Yogyakarta pada tg. 16-12-1980.
 3. Kesimpulan pembicaraan dalam Sidang Bersama PMW DIY & Kelompok Cendekiawan dan Bermanan Muhammadiyah Yogyakarta yang dipimpin oleh Sdr. Drs. H. Bakri Syahid. pada tanggal 02-01-1981.
 4. Keputusan Sidang Pleno PMW DIY pada tanggal 11-02-1981.
- Mengingat :**
1. Keputusan Musyawarah Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tg. 23 a/d 25 Januari 1981 di Yogyakarta tentang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 2. Qo'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bab. III Pasal. 7 .
 3. Keputusan Sidang Tamwir Muhammadiyah Tahun 1980 di Yogyakarta tentang Badan Pembinaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 4. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 4.
- Menimbang :**
1. Bahwa dipandang perlu segera mendirikan Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta.
 2. Pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memenuhi hajat Muhammadiyah.
 - b. Sesuai dengan hajat Masyarakat.
 - c. Memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan dan pembinaan.
- Berdasarkan :** Kesimpulan pembicaraan dalam Sidang Pleno PMW DIY pada tanggal 20 Rabi'ul akhir 1401 H / 25 Februari 1981 M.

MEMUTUSKAN :

1. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terhitung mulai tanggal : 24 Rabi'ul akhir 1401 H / 1 Maret 1981.
2. Untuk pertama kali pada tahun ajaran 1981/1982 dibuka Fakultas : Teknik jurusan teknik sipil, Psychologi, Hukum, Ekonomi, Sosial politik dan Kedokteran.

Demikianlah Surat Keputusan ini di buat untuk dimaklumi bagi masing - masing yang berkepentingan.

Yogyakarta, 20 Jumadil awal 1401 H.
26 Maret 1981 M.

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sugeng Baris,
(H. Ruman H. Sc)-.

Disampaikan kepada:
Yth. Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta.
2. PP Muhammadiyah Majelis PP & K Jakarta.
3. PMW Majelis PP & K DIY untuk menjadi maklum.



Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor A-1/01.E/PW/1981 mengenai pendirian
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
20 Jumadil Awwal 1401 H.
26 Maret 1981M.
Muhammadiyah 4053

Pemandangan Kota Yogyakarta



Pemandangan di Terminal Bus Beringharjo.
Kempen 510520 (20 Mei 1951)



Gedung Kantor Pos di Kota Yogyakarta,
Kempen K 540803 GM 1 (3 Agustus 1954)



Pemandangan pertokoan di Kota Yogyakarta.
Kempen 590822 GM 2-1 (22 Agustus 1959)



Jalan raya Malioboro, Yogyakarta.
KIT 754/51

Keagamaan

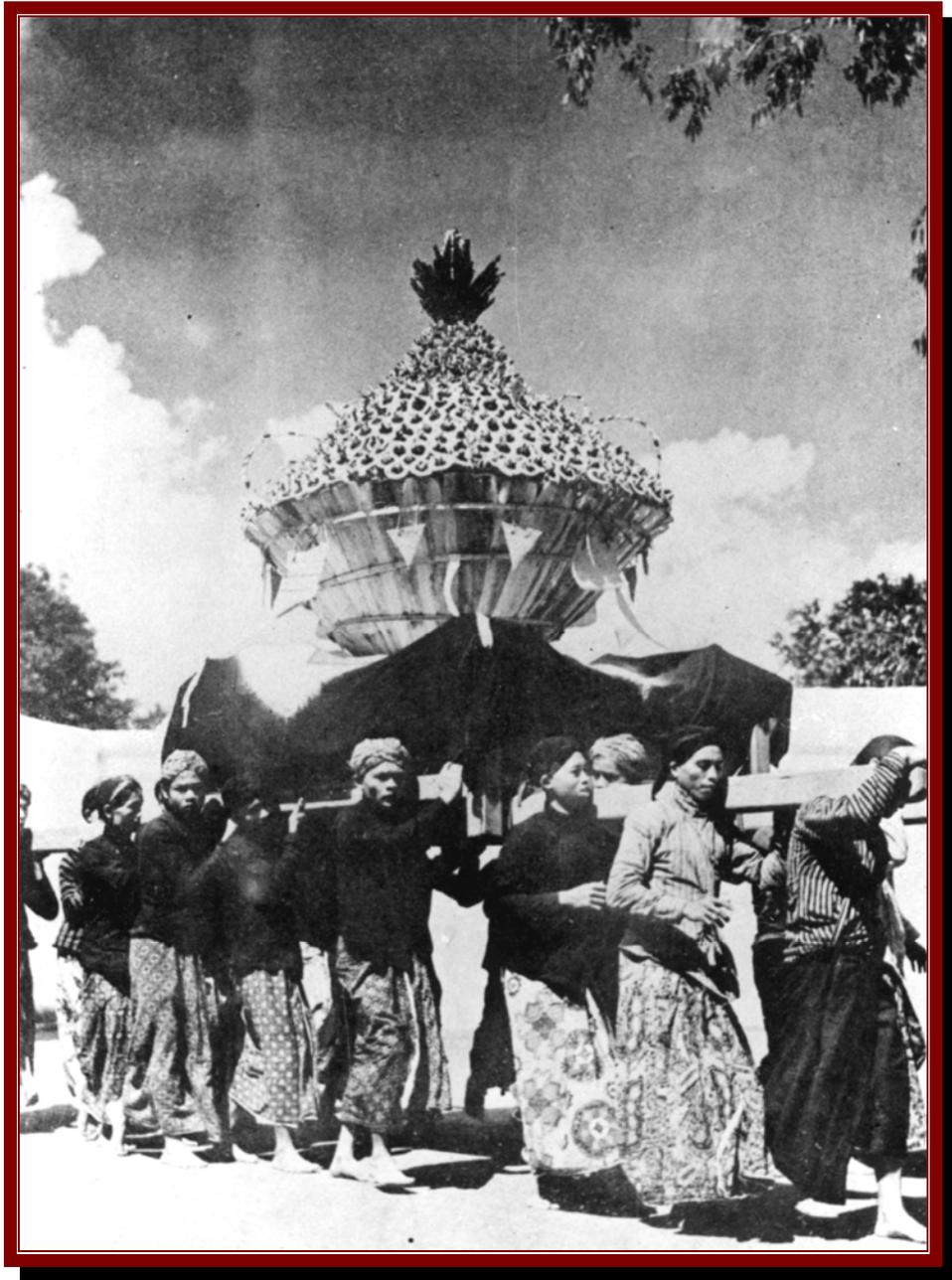


Kereta kebesaran Sultan yang diarak dalam acara
Grebeg Yogyakarta.
KIT 1107/73 (1909)



Khotbah agama Islam di Masjid Besar Keraton Yogyakarta dalam acara pembukaan Sekaten di Yogyakarta.

Kempen R521118 FG 2-1(18 Nopember 1952)

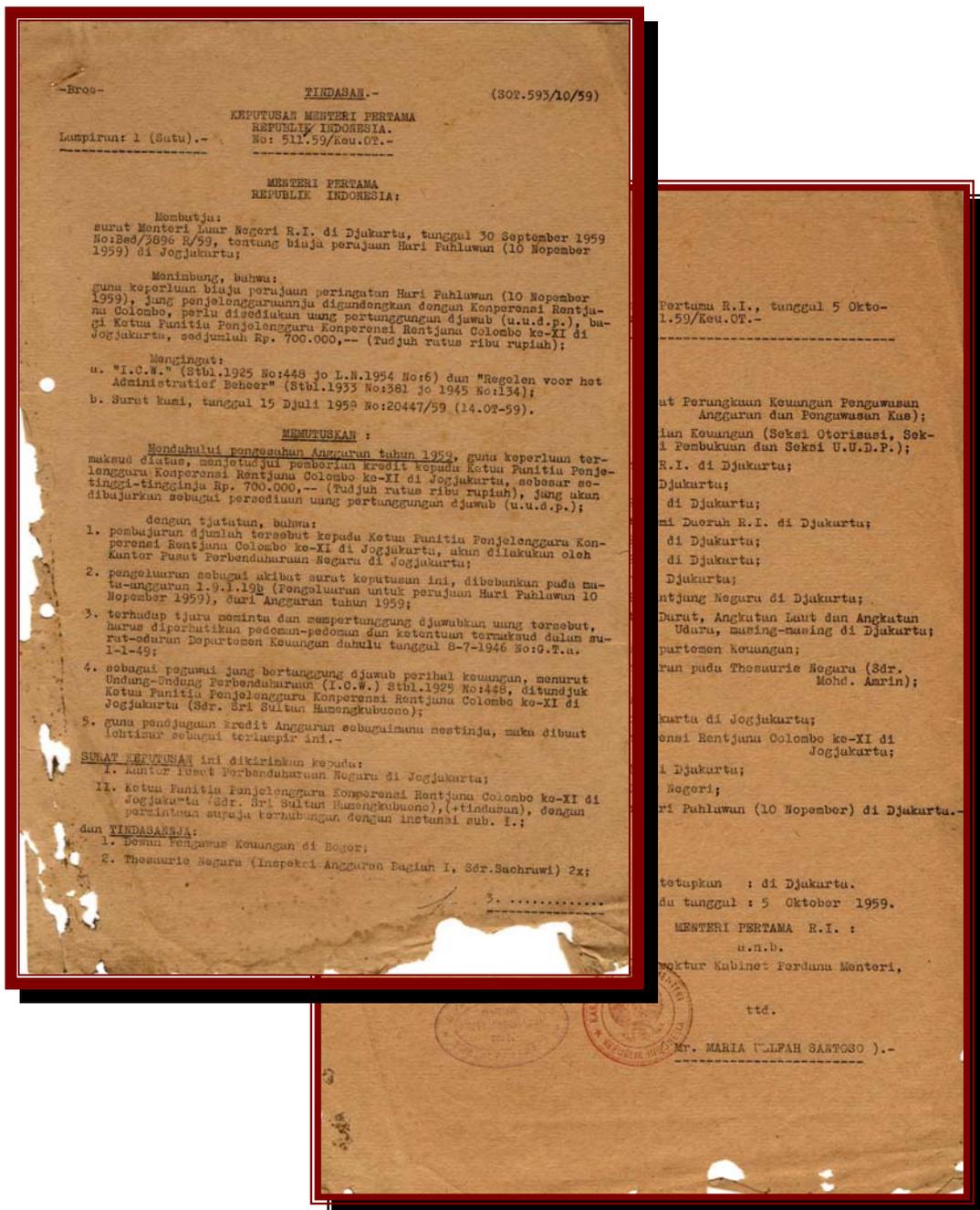


Pawai arak-arakan abdi dalem Keraton
membawa gunungan pada acara Grebeg Yogyakarta.
KIT 414/18



Prajurit membawa Gunungan pada acara pawai Grebeg.
KIT 410/60

Kerjasama



Surat Menteri Pertama tentang persetujuan kredit kepada Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Rencana Colombo ke XI di Yogyakarta, 5 Oktober 1959.

Kabinet Perdana Menteri / 325



Lagu Indonesia Raya diperdengarkan ketika Presiden Soekarno hadir dalam rangka pembukaan Konferensi Rencana Colombo.
Foto Kempen / 591111 GM 7 (11 November 1959)

Perekonomian

BANK NEGARA INDONESIA
JOGJAKARTA.

5381/6
Jogjakarta, 1 Djuni 1948. 260

No. 30/III/Rak.

Mel; HERUITRUSTING

RAHASIA.

K e p a d a

Paduka Tuan Panglima Divisi
SILIWANGI
J O G J A K A R T A .

Berhubung dengan surat Paduka Tuan tanggal 19-5-'48
dengan ini kami mempermaklumkan sebagai berikut:

1. Kami tidak berkeberatan untuk menjediakan wang sedjumlah R. 3000.000.-- (Tiga djuta Rupiah) guna keperluan usaha Paduka Tuan tentang heruitrusting Divisi Siliwangi.
2. Tiap2 pengambilan wang dari Bank Negara untuk keperluan tersebut diatas harus ditanda tangani oleh Paduka Tuan sendiri.-

BANK NEGARA INDONESIA
PRESIDEN-DIREKTUR.

(MARGONO DJOJHADIKOESOEMO).

K. B. 31964

Surat dari Direktur BNI kepada Wakil Presiden mengenai
devisa negara, 1 Juni 1948.
Djokja Documenten No. 5381



Mata Uang Republik Indonesia di Yogyakarta
pada tahun 1947.
Kempen KR530507 FG 3-18 (26 Juli 1947)



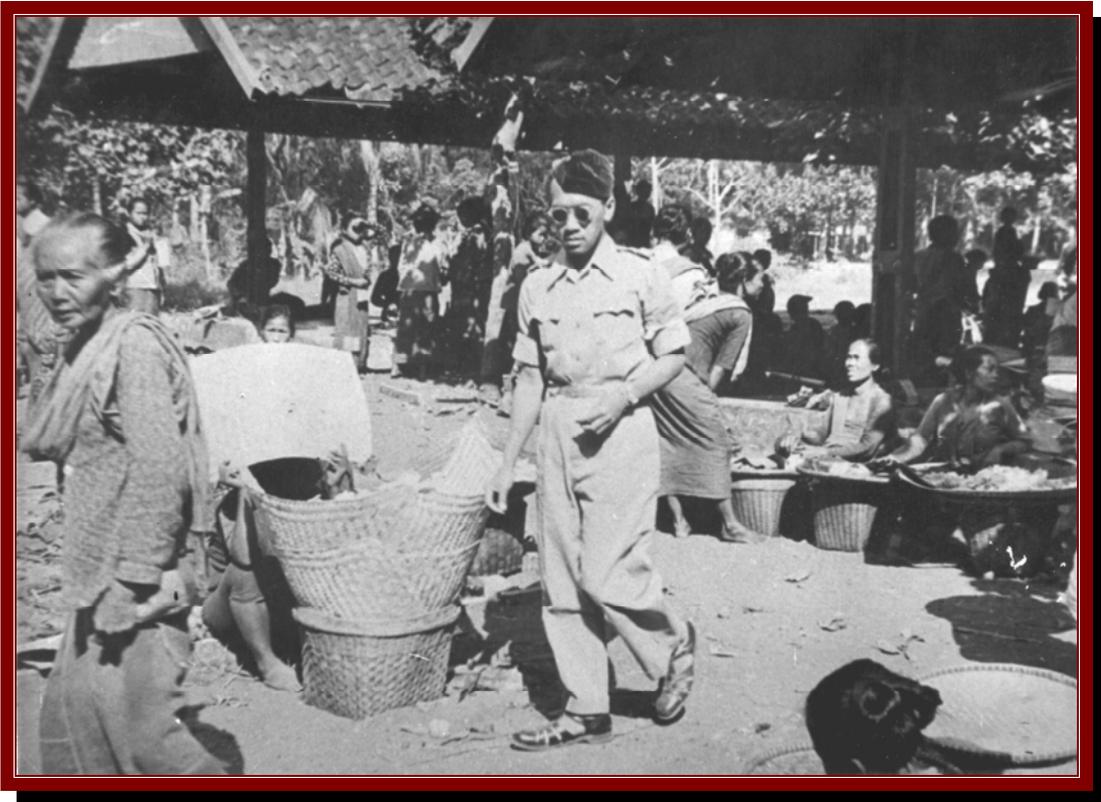
Suasana pedagang tikar di pasar Beringhardjo.
Kempen 128 (17 Mei 1951)



Suasana pedagang sayuran di Beringhardjo.
Kempen 127 (17 Mei 1951)



Pasar di Yogyakarta.
Kempen 590822 GM 3-1(22 Agustus 1959)



Sri Sultan Hamengku Buwono IX meninjau pasar.
Kempen (1952)

PIDATO P. J. M. PRESIDEN PADA PEMBUKAAN PABRIK GULA
"MADUKISMO" PADA TANGGAL 29 MEI 1958
DI JOGJAKARTA

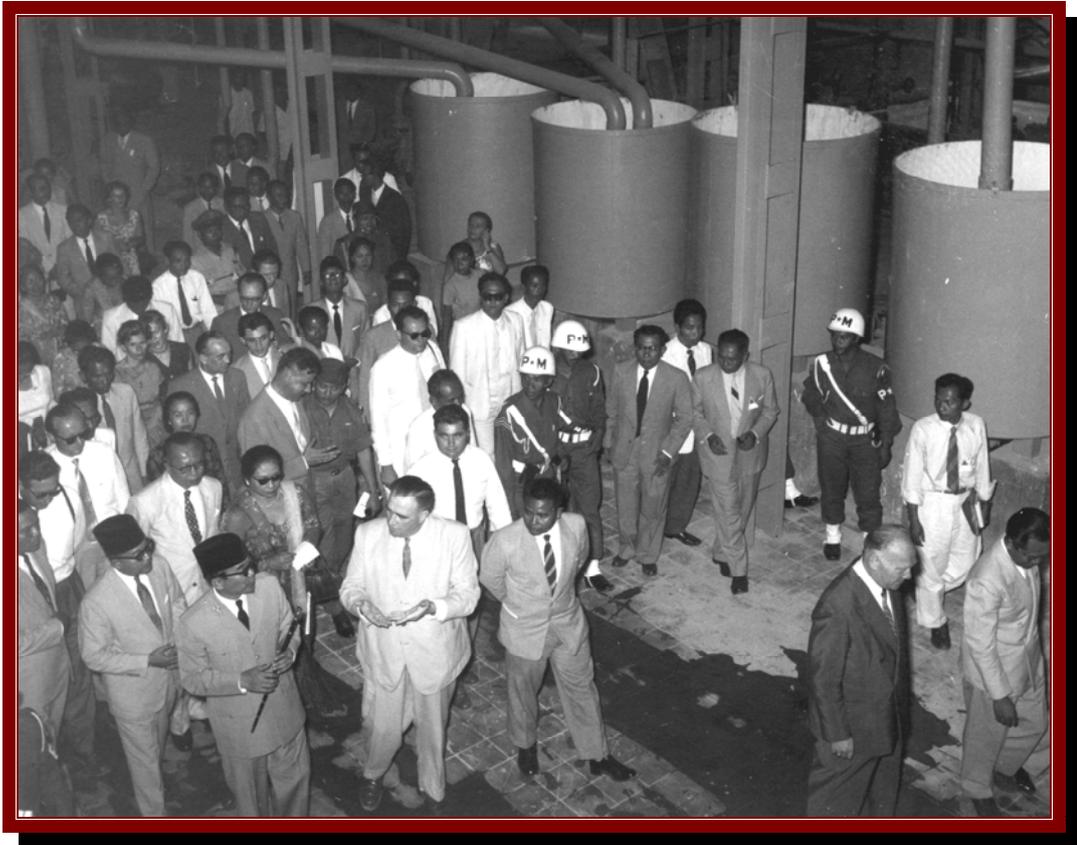
Sdr. 2 sekalian.

Didalam waktu yang amat singkat, di waktu yang akhir, hari ini buat ketiga kalinya saja mondjumpai satu seniman daripada revolusi kita senjuman, sdr. 2 mengetahui bahwa saja tempo hari berkata, bahwa for a fighting nation er untuk sesuatu bangsa yang berdjung tidak ada istilah berhenti disamping itu saja berkata pula in a fighting is only smile didalam satu bangsa yang berdjung selalu ada senjuman.

Hari ini saja mondjumpai senjuman yang ketiga dalam waktu yang amat singkat akhir ini. Pertama kali senjuman, "smile" pada waktu saja moletakkan ^{batu pertama} daripada Gedung Universitas Padjadjaran di Bandung. Tidak lama kemudian daripada itu senjuman, "smile", yang kedua pada waktu saja membuka dengan resmi paberik tekstil Ratatex di Sumber Gempel Modjokerto. Hari ini senjuman yang ketiga, smile yang ketiga, pembukaan resmi daripada Pabrik Gula Madukismo di Jogjakarta. And the word a smile, alangkah manisnya senjuman ini, sebab senjuman ini adalah senjuman gula, senjuman tebu. Sdr. 2, ja, senjuman yang kedua kataku pada waktu itu dilembahnya sungai Brantas yang mengenal sedjarah yang hebat, lembah sungai Brantas yang menjadi dasar pokok daripada perekonomian di waktu itu, lembah sungai Brantas yang mengenal nama Empu Sondok, lembah sungai Brantas yang mengenal nama Erlangga, lembah sungai Brantas yang mengenal nama Kartanegara, lembah sungai Brantas yang mengenal nama Hajan Wuruk dan Gajah Mada, Smile yang ketiga saja alami didaerah ini, djuga daerah yang bersejarah. Daerah yang menjadi subur karena gunung yang memberi abu pupuk kepada daerah itu. Sebagaimana lembah sungai

Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan
pabrik gula Madukismo di Yogyakarta,
29 Mei 1958.

Pidato Presiden No. 8



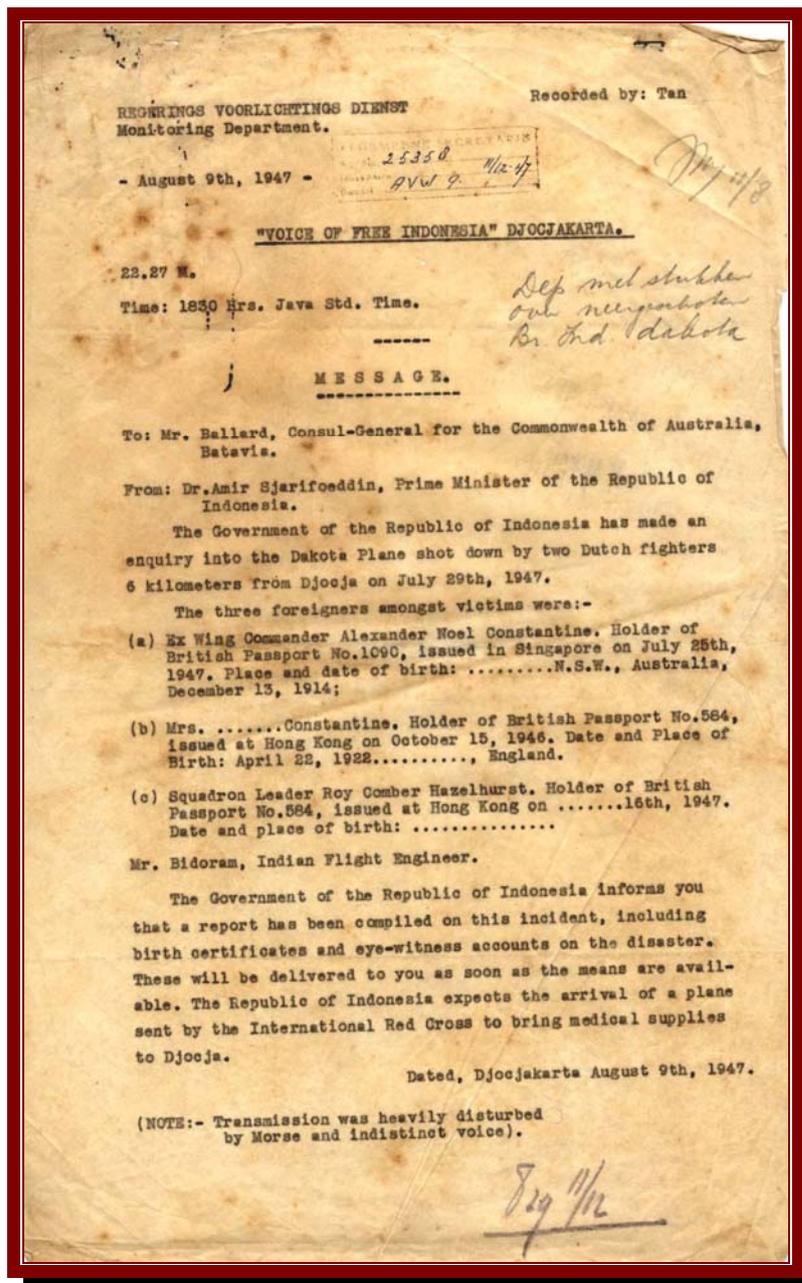
Presiden Soekarno dan rombongan sedang melihat-lihat
di dalam pabrik gula Madukismo yang baru diresmikan.
Kempen 16 (29 Mei 1958)



Presiden Soekarno dan rombongan sedang naik kereta lori pada peresmian pabrik gula Madukismo.

Kempen 17 (29 Mei 1958)

Transportasi



Peristiwa terbakarnya pesawat Dakota yang dikirim Palang Merah
Internasional yang membawa bahan obat-obatan,
9 Agustus 1947.

Algemene Secretarie No. 893

No. 588 F 4/3.-
Lampiran: -

PERihal: -
Memperbaiki djalan Djokja-Boro-
budur.-

SEGERA.

Menarik surat P.T. No. 1203/V/2 tg. 9 April '48, didalam surat mana P.T. antara lain minta supaya djalan Djokja - Borobudur selekas-nya dibersihkan dari segala rintangan2 djalan (wegversperingen) ber-hubung kemungkinannya bahwa lama2 luar negeri akan menandatangani tjandi Borobudur, maka dengan hormat kami memperaklumkan sebagai berikut:

- 1) Hal ini telah kami adjukan kepada Ketua Dewan Pertahanan Daerah Djokja-karta (Sri Paduka Paku Alam), tetapi kami dapat keterangan, bahwa meng-hilangkan rintangan2 djalan di djurusan Djokja - Tempel dsb. (djalan mana merupakan djalan untuk "doorgaand verkeer" /dilihat dari sudut kemlileran, pada waktu sekarang, belum dapat disetudjui.
- 2) Djuga atas pertajaan kami apakah rintangan2 didjalan tsb. dapat dirobah hingga dapat dilalui oleh otobus, dibalas oleh Ketua D.P.D. bahwa ini untuk sementara belum diperkenankan pula.
- 3) Jang telah dapat disetudjui ialah:
 - a) Menghilangkan rintangan2 jang tidak perlu, tetapi hanya menjukarkan lalu-lintas belaka seperti batu2 jang terhambur dengan tidak teratur didjalan, pohon2 jang ditebang dsb..
 - b) Memberi tanda2 jang djelas (umpamanya dengan tiang2 dilabur putih) ditempat "tanakad", sehingga tidak dapat menimbulkan ketjelakaan2 unt-uk lalu-lintas.
 - c) Memperbaiki djalan2, menggilas, mengebruk dan mengisi lobang2 dipengerasan ("verharding") dengan batu2 dsb.
- 4) Menarik apa jang diuraikan diatas, maka djalan Djokja - Borobudur hanya akan dapat dilalui oleh oto biasa, jeep dan prahoto jang tidak terlalu besar.

Demikianlah untuk mendjadikan periksa.-

∠ lihat sebelah

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM;
A.n. Kepala Djawatan Djalan2;



Insinyur,
Wegote
(Ir. R. Sugoto).-

*Tata usaha
Keap bntz
1/2 surt smp no 1203/V/2
2/2 surt Km. Rel. No. no 588 F 4/3*

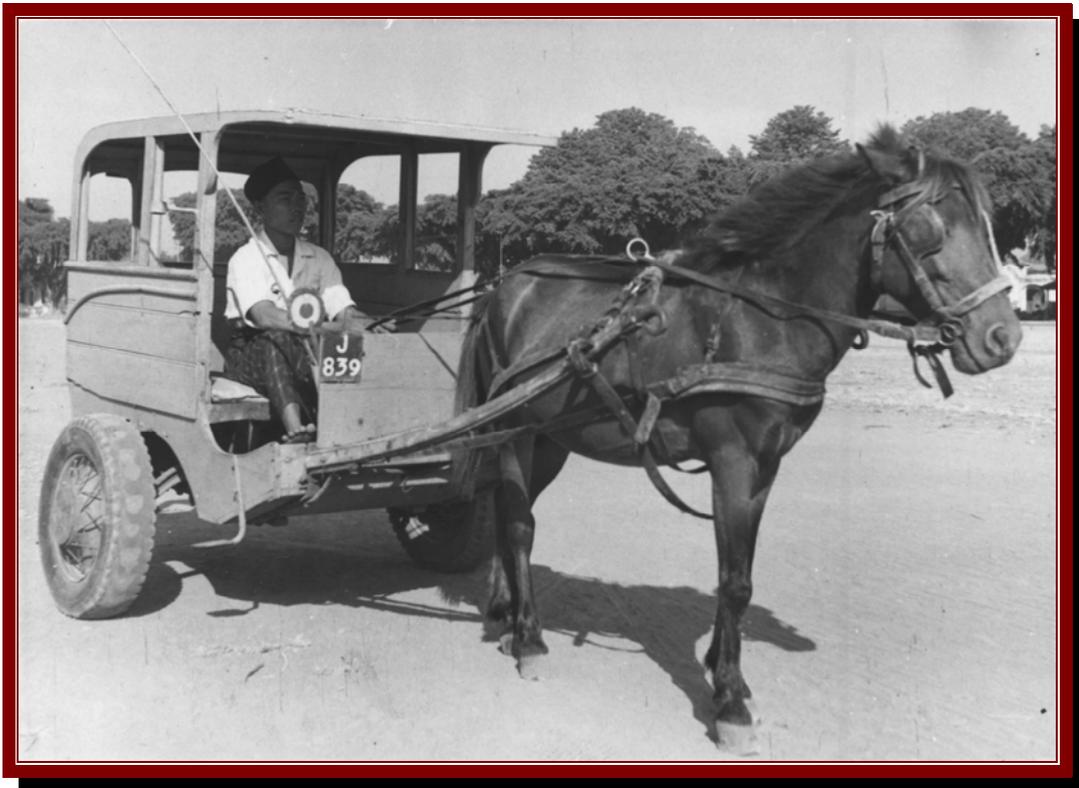
Kepada
Jang terhormat Sekretaris Delegasi Indonesia
(Mr. A.W. Surjoadinigrat)
di
JOGJAKARTA.-

Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Sekretaris Delegasi Indonesia tentang perbaikan jalan Yogyakarta – Borobudur, 14 April 1948.
Delegasi Indonesia No. 840



Alat pengangkut di Yogyakarta berupa gerobak yang ditarik lembu.

Kempen 500625 GM 6 (25 Juni 1950)



Andong dengan kusirnya sebagai kendaraan dinas
Kabupaten Gunung Kidul.
Kempen 2 (14 Juli 1952)



Jalan raya Dekso – Samigaluh Kabupaten Kulonprogo
yang baru dibuka.

Kempen 14 (7 Desember 1956)



Lalu lintas di Yogyakarta.
Kempen 1(24 – 30 April 1957)



Pembukaan Jembatan Jenderal Sudirman di Yogyakarta.
Kempen 10 (11 Desember 1958)

Tamu Negara dan Tokoh Nasional



Sri Paku Alam tengah berziarah ke makam
Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada acara peresmian makam tersebut.
Kempen 8 (7 Januari 1954)



Kunjungan Presiden Soekarno di Padepokan Ki Hajar Dewantara.
Kempen 3 (22 Februari 1959)



Tangga menuju makam raja-raja di Imogiri.
KIT 817/89



Rombongan Perdana Menteri Nehru dan Presiden Soekarno sedang mendengarkan penjelasan mengenai pewayangan.
Kempen 500611 GM 11 (11 Juni 1950)



Perdana Menteri Kamboja Norodom Sihanouk dan rombongan
tiba di Lapangan Terbang Adisucipto Yogyakarta
yang disambut oleh Sri Sultan HB IX.
Kempen 590212 GM 3 (12 Februari 1959)



Tembakan Salvo pada saat upacara pemakaman jenazah
Dr. Ki Hajar Dewantara.
Kempen 590429 GM 27 (29 April 1959)

Industri



Presiden Soekarno meninjau tempat pembuatan batik di Yogyakarta.
Kempen 591109 GM 2-5 (9 November 1959)



Rombongan Presiden Philipina Elpidio Quirino dan Presiden Soekarno sedang melihat-lihat batik sebagai hasil kerajinan rakyat yang dipamerkan di Kepatihan Yogyakarta.

Kempen 520721 GM 1-44 (21 Juli 1952)

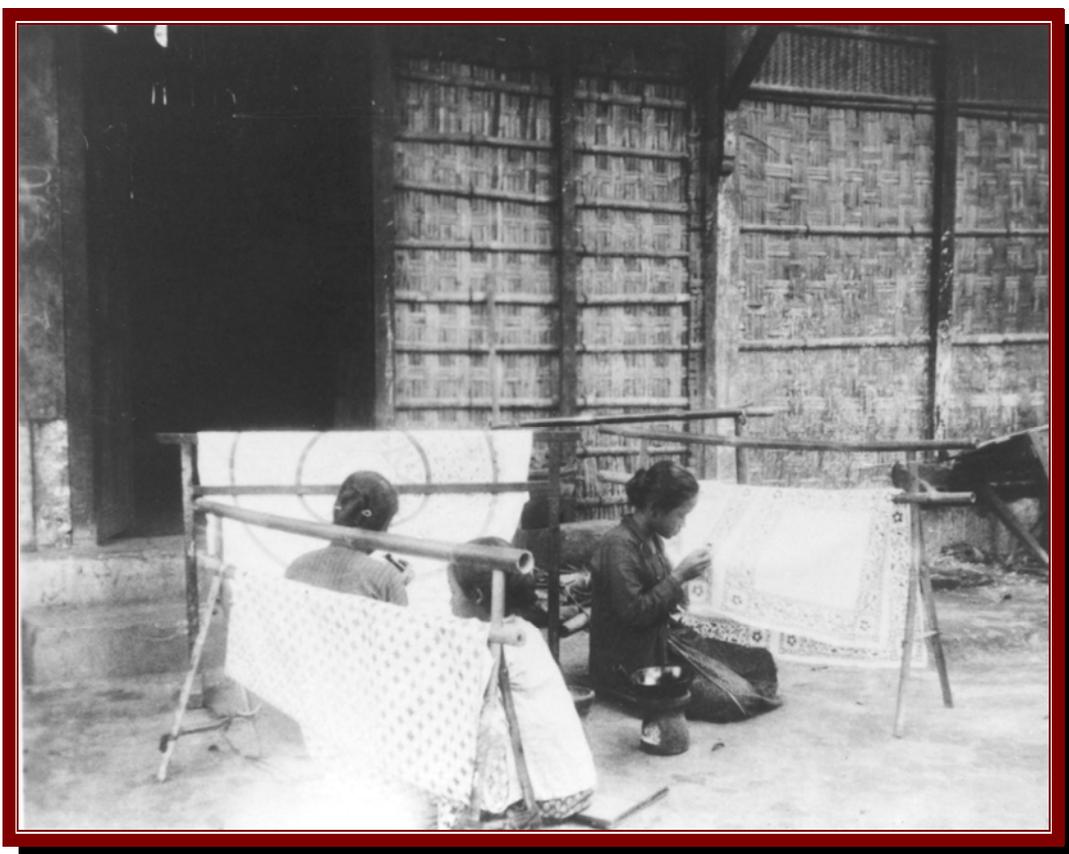


Barang kerajinan dari perak terukir di salah satu perusahaan seni ukir perak, Kota Gede Yogyakarta.

Kempen 540725 GM 2-1 (25 Juli 1954)

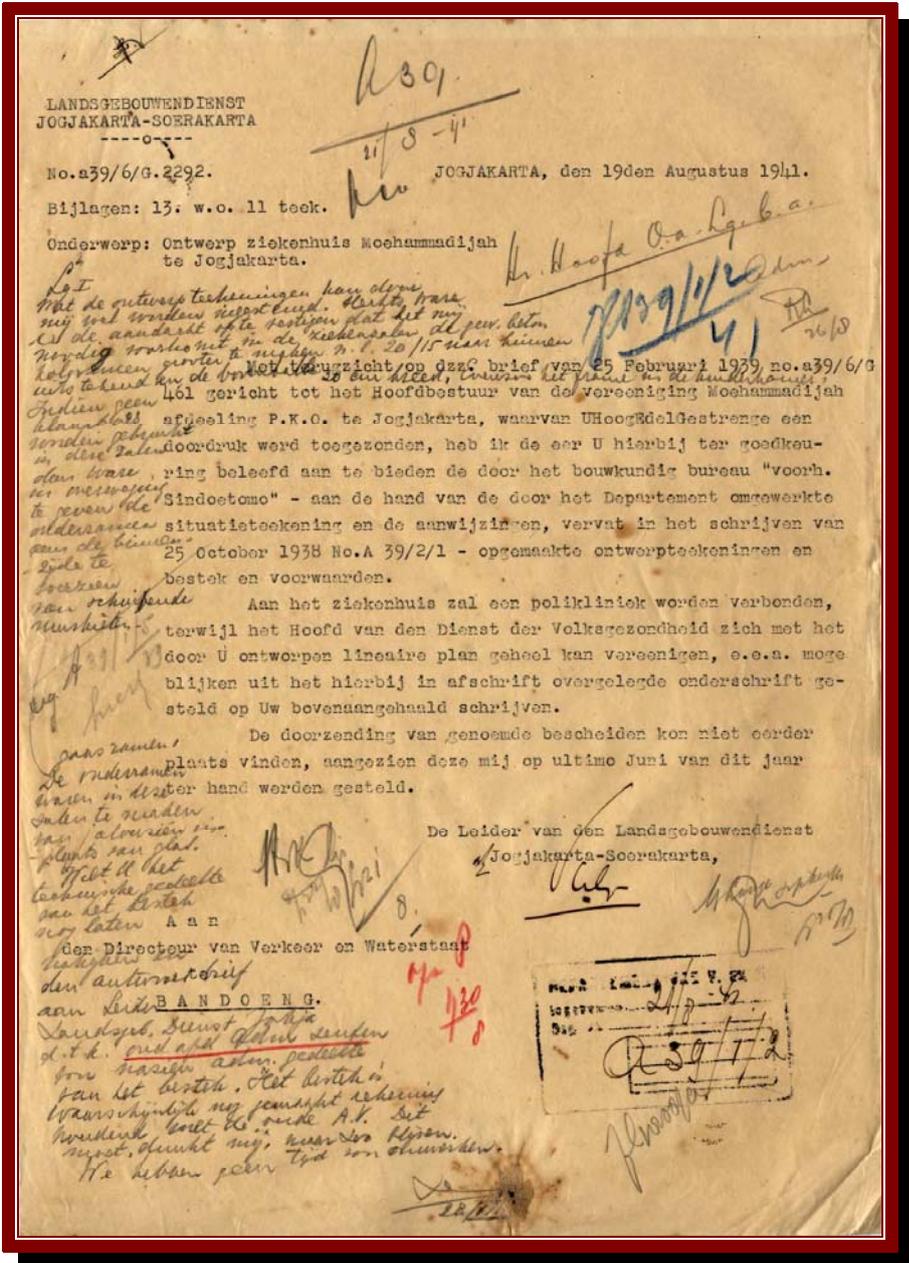


Industri penyamakan kulit.
Kempen R 540312 FG 1-4 (22 Agustus 1959)



Wanita sedang membatik.
KIT 713/54

Kesehatan



Surat dari Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Yogyakarta-Surakarta tentang pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, 1941.
BOW No. AX-66

Menteri Kesehatan termuat dalam suratnya tg 12 Maret 1957 no 528/Um/Pend, dengan ketentuan bahwa pendidikan ini hanya diselenggarakan untuk satu angkatan.

K e m p a t : Menjatikan peraturan Menteri Kesehatan termuat dalam surat keputusan tanggal:
a. 7 Desember 1955 no 107087/Kab dengan perubahannya tg 7 Februari 1957 no 233/Um/Pend dan tg 4 Maret 1957 no 438/Um/Pend tentang Peraturan Pendidikan Djuru Kesehatan dan Pengamat Kesehatan;
b. 11 Mei 1953 no 20523/Pend yang diperbaiki pada tg 4 Djuni 1953 tentang uang saku dan/atau tunjangan ikatan dinas bagi peladjar pendidikan tenaga medis, serta segala perubahan dan tambahan yang kemudian diadakan;
c. 16 Djuli 1952 no 32391/Pend dengan perubahannya tg 6 Mei 1953 no 19683/Pend tentang honorarium bagi tenaga pengadjar medis-teknis;
a, b dan c berlaku bagi Sekolah Djuru Kesehatan dan Sekolah Pengamat Kesehatan termaksud diatas.

K e l i m a : Memberi kuasa kepada Presiden Universitas Gadjah Mada untuk:
a. atas nama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan selaku wakil Pemerintah Republik Indonesia mengadakan perjanjian ikatan dinas dengan para peladjar Sekolah Djuru Kesehatan dan Sekolah Pengamat Kesehatan yang diselenggarakan pada Rumah Sakit/Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta;
b. menetapkan putusan tentang pemberian tunjangan ikatan dinas kepada para peladjar tersebut diatas;
a dan b menurut peraturan yang berlaku.

K e e n a m : Segala biaya penyelenggaraan sekolah termaksud, termasuk biaya uang saku, tunjangan ikatan dinas peladjar dan honorarium pengadjar, sekedar mengenai tahun 1956 dan 1957 dibebankan pada pasal anggaran 10.3.5, dan 10.3.6, dan 10.3.10 dari anggaran belandaja Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1956 dan 1957 dan untuk selanjutnya pada mata-anggaran yang disediakan untuk keperluan itu.

K e t u d j u h : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang bertalian dengan:
a. pasal "Pertama" berlaku surut sampai 1 Agustus 1956;
b. pasal "Ketiga" berlaku surut sampai 1 Februari 1957.

- Salinan kepada :
1. Kabinet Presiden.
 2. Kabinet Perdana Menteri.
 3. Sekretariat Dewan Menteri.
 4. Semua Kementerian.
 5. Kementerian Kesehatan Bagian Pendidikan.
 6. Theasurir-Djenderal Kementerian Keuangan.
 7. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri.
 8. Semua Kantor Perbendaharaan.
 9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
 10. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
 11. Kantor Urusan Pegawai.
 12. Djawatan Perdjalan.
 13. Semua Universitas dan Perguruan Tinggi Negeri.
 14. Semua Djawatan, Biro dan Bagian Kementerian P.P.K.
 15. Kementerian Kehakiman dengan permohonan supaya diusahakan termuatnya dalam Tambahan-Lembaran Negara.

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,
a.n. Menteri,
Acting Sekretaris-Djenderal,

(O. Siswosubroto).-

KPPK. No. 1420/57.-

Fragmen SK No. 58260/S Menteri Pendidikan Pengajaran dan
Kebudayaan tentang pendirian Sekolah Juru Kesehatan
di Yogyakarta,
26 Juni 1957.
Kabinet Presiden 671

Daftar Arsip yang Diserahkan

GEOGRAFIS

1. Peta topografi dan pembagian wilayah administrasi karesidenan Yogyakarta, 1921.
Peta Indonesia No. 163/16
2. Wates Srandakan Galur, Sentolo Yogyakarta, 1942.
Peta Indonesia No. 423/47/XLII-C dan 47/XLIIIA/23
3. Bantul (Imogiri, Kebanongan) Yogyakarta, 1944.
Peta Indonesia No. 1899 – 1960/424/47/XLII-D/23
4. Peta perencanaan kota Yogyakarta, cetak ulang tahun 1945.
Peta/1291/47/XLII/46
5. Foto udara kota Yogyakarta
KIT No.754/57

PEMERINTAHAN

6. Peta Ibukota Yogyakarta dan Istana Sultan, 1830
Koleksi Khusus
7. Perjanjian Giyanti antara Sultan Hamengku Buwono I dan Nicolas Hartingh mengenai pembagian daerah kerajaan Mataram, 1755.
Djokja No. 42/1
3 lembar
8. Daftar tanah yang dimiliki Sultan Djokja yang dibuat di Semarang, 1733.
Djokja No. 43
60 lembar
9. Akte persetujuan tentang batas yang diperbaharui antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta, 27 September 1830.
Djogja No. 10-1
4 lembar

10. Akte tentang penobatan Sultan Hamengkoe Boewono V, Sabtu 26 November 1836.
Djokja No. 9-8
48 lembar
11. Keputusan Markas Angkatan Perang Sabil Yogyakarta tentang penunjukkan Sri Paduka Hamengku Buwono untuk memimpin Kementerian Pertahanan, 25 Januari 1948.
Djogja Documenten No. 244
5 lembar
12. Defile Pasukan TNI pada pelantikan Soekarno sebagai Presiden RIS di Yogyakarta, 17 Desember 1949.
Kempen GM1-591217
13. Soekarno berjalan menuju Sitihinggil Keraton Yogya untuk melakukan pelantikan Presiden RIS, 17 Desember 1949.
Kempen GM8-91217
14. Petisi Dewan Harian Yayasan Universitas Proklamasi (45) mengenai status Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 juli 1979.
Setwapres Adam Malik No. 205
2 lembar

KESULTANAN DJOGJA

15. Daftar Bupati dan pegawai-pegawai Sultan beserta pendapatan yang diperoleh dan tanah yang dimilikinya, 28 September 1825.
Djokja No. 6-13
20 lembar
16. Sultan Hamengku Buwono VII dan Bupati di depan keraton Yogyakarta, 1910.
KIT 129-6
17. Permaisuri Hamengku Buwono VII di depan kraton Yogyakarta, 1920.
KIT 225-50

18. Sultan Hamengku Buwono IX ketika remaja, 1926.
KIT 214-64
19. Posisi duduk resmi dari Permaisuri Sultan Hamengku Buwono VIII dan para Raden Ayu di Istana Yogyakarta.
KIT 212-58
20. Gusti Kanjeng Ratu Maduretno Kertonegoro, istri dari Raden Tumenggung Kertonegoro, Yogyakarta.
KIT 276-30
21. Kraton Gedung Kuning tempat menerima tamu kesultanan.
KIT 07-4
22. Prosesi Sultan Hamengku Buwono ke VIII di Keraton.
KIT 213-16
23. Taman Sari tempat pemandian dan peristirahatan keluarga Kesultanan Yogyakarta.
Kempen 530603 GM2-2
24. Silsilah putra-putra Sultan Hamengku Buwono VII dan Hamengku Buwono VIII dan saudara-saudara dari Sultan Hamengku Buwono IX.
Djogja Documenten No. 312

POLITIK

25. Peta Perang Diponegoro, 1825 – 1830.
Koleksi Khusus
26. Laporan dari Residen Yogyakarta J.I. van Seven Hoven mengenai tanah Kesultanan Yogya yang menyebabkan timbulnya perlawanan Diponegoro, 1826.
Djogja No. 8/1
27. Advis dari Letnan Gubernur Jenderal H.W. de Kock atas nota Residen Surakarta berkenaan dengan perlawanan terhadap Mataram (termasuk Yogyakarta), 20 Mei 1826
Djogja No. 8-2
26 lembar

28. Daftar tawanan pengikut Kyai Mojo di Yogyakarta dilaporkan oleh Residen Surakarta, 16 November 1828.
Djokja No. 18-4
10 lembar
29. Laporan H.W. de Kock mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang, 1 April 1830.
Djokja No. 10-5
32 lembar
30. Ketetapan Presiden RI (Ir. Soekarno) mengenai Negari Ngajogjokarta Hadiningrat dan Negari Paku Alaman sebagai bagian dari Republik Indonesia . 19 Agustus 1945.
Kementerian Dalam Negeri No. 1
1 lembar
31. Amanat Seri Paduka Inggang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII mengenai Negari Ngajogjokarta Hadiningrat dan Negari Paku Alaman adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. 28 Puasa Eho 1876
(5 September 1945)
Kementrian Dalam Negeri No. 1
1 lembar
32. Keputusan hasil Kongres Pemuda Indonesia ke II di Yogyakarta, 8-9 Juni 1946.
Djogja Documenten 51
3 lembar
33. Surat Perintah Presiden RI kepada Kepala Kepolisian Negara dan Mayor Jenderal Santoso, Panglima Polisi Tentara tentang penjagaan Kaliurang dan sekitarnya selama perundingan Indonesia Belanda, 12 April 1948
Delegasi Indonesia No. 310
1 lembar

34. Berita Kepolisian Keamanan Daerah III A (Banyumas) tentang rencana serbuan tentara Belanda ke Yogyakarta, 24 April 1948.
Delegasi Indonesia No. 493
2 lembar
35. Notulen Rapat Delegasi Indonesia dengan Kabinet di Istana Presiden Yogyakarta, 26 April 1948.
Delegasi Indonesia No. 904
4 lembar
36. Pemberitahuan Sekjen Kementerian Pertahanan tentang tugas-tugas TNI Bagian Masyarakat, 9 September 1948.
Djogja Documenten No. 25
37. Politik Bumi Hangus terhadap gedung-gedung BNI, 8 November 1948.
Djogja Documenten No. 125
1 lembar
38. Surat dari Mohammad Hatta kepada Pandit Jawaharlal Nehru New Delhi mengenai posisi sulit Indonesia dalam berurusan dengan Belanda, 16 Desember 1948.
Djogja Documenten No. 14
9 lembar
39. Surat persetujuan pertama pengembalian Yogyakarta dan penjelasan singkat dalam kaitan perundingan Roem Royen, 7 Mei 1949.
Delegasi Indonesia No. 964
3 lembar
40. Telegram Ketua PDRI Mr. Sjafrudin Prawiranegara tentang Susunan pemerintahan Militer, 14 Maret 1949.
PDRI No. 242
2 lembar

41. Panglima Besar Soedirman didampingi Letkol Soeharto tiba di Yogyakarta disambut oleh Kolonel Suhud dan para perwira lainnya, 1949.
Kempen 130 A
42. Hamengku Buwono IX menyambut kedatangan presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta kembali dari pengasingan, 1949.
Kempen 169
43. Surat Bung Karno kepada Jenderal Sudirman menjelaskan posisi politik yang diambil mengenai RIS.
27 Desember 1949
ANRI
44. Presiden Soekarno dan Mr. Asaat pada saat penyerahan pemerintah RI di Istana Kepresidenan, 12-15 Agustus 1950.
Kempen 50059
45. Presiden Soekarno memberi selamat perpisahan kepada Dr. Radjiman di lapangan Terbang Maguwo, Yogyakarta. 12-15 Agustus 1950.
Kempen 50038
46. Upacara penyerahan pemerintahan Republik Indonesia di Istana Presiden, Presiden Soekarno sedang berpidato pada sidang BP KNIP pada waktu penyerahan RI kepada NKRI, 12-15 Agustus 1950
Kempen 50018
47. Upacara penyerahan Pemerintah RI di Istana Presiden, Dr. Abdul Halim menyerahkan kembali mandatnya kepada Mr. Asaat, 12-15 Agustus 1950.
Kempen 50051
48. Masyarakat Kab. Gunung Kidul sedang antri untuk melakukan pemilihan umum, 29 September 1955.
Kempen 5

49. Kantor Panitia Pemilihan Kota Pradja Yogyakarta, tampak petugas keamanan sedang berjaga-jaga, 29 September 1955.
Kempen 5
50. Pemilu untuk Konstituante Kabupaten Gunung Kidul, 15 Desember 1955.
Kempen
51. Perayaan 17 Agustus 1956 di Gedung Negara Yogyakarta.
Kempen 7
52. Wakil Presiden Moh. Hatta tiba di Yogyakarta untuk menghadiri peringatan 200 tahun Yogyakarta, 6 Oktober 1956.
Kempen
53. Mr. Ali Sastroamidjojo berpidato pada acara peringatan 200 tahun Yogyakarta, 6 Oktober 1956.
Kempen
54. Seorang wanita sedang memasukkan kartu pemilihnya ke dalam kotak suara dalam pemilihan umum DPRD Yogyakarta, 7 November 1957.
Kempen 32
55. Para Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul bergambar bersama dimuka pendopo sesudah pelantikan di Yogyakarta, 10 Februari 1958.
Kempen
56. Rapat umum mendukung rencana Dekrit Kembali Ke UUD'45 di Yogyakarta, 19 April 1959
Kempen
57. Presiden Soekarno menandatangani Naskah Trikora di Yogyakarta, 19 Desember 1961
Kempen 611219 GM 24

58. Amanat Presiden Soekarno pada Rapat Trikora di Yogyakarta. 19 Desember 1961.
Kempen 611219 GM 23
59. Naskah salinan penjelasan Letnan Jenderal Soeharto kepada Perwira Staf Sejarah Militer mengenai beberapa keterangan yang menyangkut peristiwa serangan umum , 1966
Jamal Marsudi No. 123
6 lembar
60. Naskah salinan pidato sambutan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada peresmian monumen serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, 1973.
Jamal Marsudi No. 124
3 lembar
61. Naskah salinan tentang kesan-kesan dan tanya jawab pers dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen Widodo sewaktu menjabat Kasdam VII Diponegoro mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949.
Jamal Marsudi No. 126
10 lembar

BANGUNAN BERSEJARAH

62. Gerbang utama benteng Vredenburg di Yogyakarta, 1896.
KIT 1107-1
63. Tugu Malioboro, Yogyakarta, 1920
KIT 1106-28
64. Pintu Plengkung Asem di Yogyakarta, 1920.
KIT 1106-58
65. Notulen rapat masalah pengairan dari kali Opak Yogyakarta, 2 Juni 1922
BOW No. EV-89
44 lembar

66. Pemeliharaan rumah tahanan Wonosari Yogyakarta, 1941.
BOW No. AX-101
16 lembar
67. Gereja Katholik di Panembahan, 20 Mei 1951.
Kempen 513770
68. Masjid Syuhada di Yogyakarta, 17 November 1952.
Kempen 521117 GM 1
69. Gedung Negara Yogyakarta, 17 Agustus 1953.
Kempen 530817 GM 3-2
70. Gedung Taman Siswa di Yogyakarta. 29 April 1959
Kempen 590429 GM 41

PENDIDIKAN

71. Peresmian Perguruan Tinggi Gajah Mada di Istana Presiden, nampak Prof. Sardjito tengah memberi pidato. 12 Agustus 1950.
Kempen 50042
72. Presiden Soekarno memberikan kata sambutan setelah menerima surat tanda promosi *Honoris Causa* sebagai Doktor baru, 18 – 23 September 1951.
Kempen 510919 GM 10
73. Paduka Yang Mulia Dr. Ir. Soekarno menerima pemberian selamat dari Presiden Universitas Gajah Mada Dr. Notonegoro di ruang resepsi Pagelaran, 18 – 23 September 1951.
Kempen 510919 GM 17
74. Peletakan batu pertama Universitas Negeri Gajah Mada oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta, 10 Januari 1952.
Kempen 40

75. Gedung Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta, 1952.
Kempen 6
76. Pembukaan Gedung Asrama Ratnaningsih untuk para mahasiswa UGM, nampak Presiden Soekarno bersama-sama Menteri PP&K, Mr. Moh Yamin tengah melihat ruang asrama, 19 Desember 1954.
Kempen 541219 GM 19
77. Wakil Presiden M. Hatta diiringi oleh para penyambut menuju aula tempat upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Gajah Mada, 27 November 1956.
Kempen 561127 GM 1
78. Pemberian Doktor Honoris Causa kepada Ki Hajar Dewantoro oleh Presiden Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Sardjito, bertepatan dengan Dies Natalis ke VII Universitas tersebut, 19 Desember 1956.
Kempen 54
79. Penyerahan Buku Windon Daerah Provinsi Seluruh Indonesia oleh Kepala Pendagri Kempen Darjono kepada DR. Ki Hajar Dewantoro, di Yogyakarta, 2 Nopember 1957
Kempen 3
80. Kuliah umum oleh Presiden Soekarno di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 28 Mei 1958.
Pidato Presiden No. 928
33 lembar
81. Presiden Soekarno sedang memberikan wejangan pada saat meresmikan gedung pusat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 19 Desember 1959.
Kempen 591219 GM 6
82. Gedung Universitas Gajah Mada dilihat dari depan, 19 Desember 1959.
Kempen 591219 GM 11

83. Penyerahan buku Pelayanan Semesta oleh Prof. Moh. Yamin kepada Presiden UGM, Prof. Dr. Sardjito di Gedung Negara, 19 Desember 1960.
Kempen I
84. Pemberian gelar kehormatan akademis Doktor Honoris Causa dari Yayasan Universitas Proklamasi (45) kepada dua orang tokoh Islam Mr. Moh. Natsir dan Mr. Moh Roem, 16 Juni 1980.
Setwapres Adam Malik / 652
7 lembar
85. Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor A-1/01.E/PW/1981 mengenai pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 20 Jumadil Awwal 1401 H. (26 Maret 1981M.)
Muhammadiyah 4053

PEMANDANGAN KOTA YOGYAKARTA

86. Pemandangan di Terminal Bus Beringharjo, 20 Mei 1951.
Kempen 510520
87. Gedung kantor Pos di Kota Yogyakarta, 3 Agustus 1954.
Kempen K 540803 GM 1
88. Pemandangan pertokoan di Kota Yogyakarta, 22 Agustus 1959.
Kempen 590822 GM 2-1
89. Jalan raya Malioboro, Yogyakarta.
KIT 754/51

KEAGAMAAN

90. Kereta kebesaran Sultan yang diarak dalam acara Grebeg Yogyakarta, 1909.
KIT 1107/73

91. Khotbah agama Islam di Masjid Besar Keraton Keraton Yogyakarta dalam acara pembukaan Sekaten di Yogyakarta, 18 Nopember 1952
Kempen R521118 FG 2-1
92. Pawai arak-arakan abdi dalem Keraton membawa gunungan pada acara Grebeg Yogyakarta.
KIT 414/18
93. Prajurit membawa Gunungan pada acara pawai Grebeg.
KIT 410/60

KERJA SAMA

89. Surat Menteri Pertama tentang persetujuan kredit kepada Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Rencana Colombo ke XI di Yogyakarta, 5 Oktober 1959.
Kabinet Perdana Menteri / 325
3 lembar
90. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan ketika presiden Soekarno hadir dalam rangka pembukaan Konferensi Rencana Colombo, 11 November 1959.
Foto Kempen / 591111 GM 7

PEREKONOMIAN

91. Catatan mengenai Penghasilan Sultan beserta identitas masing-masing pasukannya, 22 Maret 1808.
Djogja No. 45/8
33 lembar
92. Surat dari Direktur BNI kepada Wakil Presiden mengenai devisa negara, 1 Juni 1948.
Djogja Documenten No. 5381
1 lembar

93. Mata Uang Republik Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1947, 26 Juli 1947.
Kempen KR530507 FG 3-18
94. Suasana pedagang tikar di pasar Bringhardjo, 17 Mei 1951.
Kempen 128
95. Suasana pedagang sayuran di Beringhardjo, 17 Mei 1951.
Kempen 127
96. Sri Sultan Hamengku Buwono IX meninjau pasar, 1952.
Kempen 1952
97. Pasar di Yogyakarta, 22 Agustus 1959
Kempen 590822 GM 3-1
98. Pidato Presiden pada pembukaan pabrik gula Madukismo di Yogyakarta, 29 Mei 1958.
Pidato Presiden No. 8
5 lembar
99. Presiden Soekarno dan rombongan sedang melihat-lihat di dalam pabrik gula Madukismo yang baru diresmikan, 29 Mei 1958.
Kempen 16
100. Presiden Soekarno dan rombongan sedang naik kereta lori pada peresmian pabrik gula Madukismo, 29 Mei 1958.
Kempen 17

TRANSPORTASI

101. Peristiwa tertembaknya pesawat Dakota yang dikirim Palang Merah Internasional yang membawa bahan obat-obatan, 9 Agustus 1947.
Algemene Secretarie No. 893
10 lembar

102. Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Sekretaris Delegasi Indonesia tentang perbaikan jalan Yogyakarta – Borobudur, 14 April 1948.
Delegasi Indonesia No. 840
5 lembar
103. Alat pengangkut di Yogyakarta berupa gerobak yang ditarik lembu, 25 Juni 1950.
Kempen 500625 GM 6
104. Andong dengan kusirnya sebagai kendaraan dinas Kabupaten Gunung Kidul, 14 Juli 1952.
Kempen 2
105. Jalan raya Dekso – Samigaluh kabupaten Kulonprogo yang baru dibuka, 7 Desember 1956.
Kempen 14
106. Lalu lintas di Yogyakarta, 24 – 30 April 1957.
Kempen 1
107. Pembukaan jembatan Jenderal Sudirman di Yogyakarta, 11 Desember 1958.
Kempen 10

TAMU NEGARA DAN TOKOH NASIONAL

108. Sri Paku Alam tengah berjiarah ke makam Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada acara peresmian makam tersebut, 7 Januari 1954.
Kempen 8
109. Kunjungan Presiden Soekarno di Padepokan Ki Hajar Dewantoro, 22 Februari 1959.
Kempen 3
110. Tangga menuju makam raja-raja di Imogiri.
KIT 817/89

- 111. Rombongan Perdana Menteri Nehru dan Presiden Soekarno sedang mendengarkan penjelasan mengenai pewayangan, 11 Juni 1950.
Kempen 500611 GM 11
- 112. Perdana menteri Kamboja Norodam Sihanouk dan rombongan tiba di Lapangan Terbang Adisucipto Yogyakarta yang disambut oleh Sri Sultan HB IX, 12 Februari 1959.
Kempen 590212 GM 3
- 113. Tembakan Salvo pada saat upacara pemakaman jenazah Dr. Ki Hajar Dewantoro, 29 April 1959.
Kempen 590429 GM 27

INDUSTRI

- 114. Presiden Soekarno meninjau tempat pembuatan batik di Yogyakarta,
9 November 1959
Kempen 591109 GM 2-5
- 115. Rombongan Presiden Philipina Elpidio Quirino dan Presiden Soekarno sedang melihat-lihat batik sebagai hasil kerajinan rakyat yang dipamerkan di Kepatihan Yogyakarta, 21 Juli 1952.
Kempen 520721 GM 1-44
- 116. Barang kerajinan dari perak terukir di salah satu perusahaan seni ukir perak, Kota Gede Yogyakarta, 25 Juli 1954.
Kempen 540725 GM 2-1
- 117. Industri penyamakan kulit, 22 Agustus 1959.
Kempen R 540312 FG 1-4
- 118. Wanita sedang membatik.
KIT 713/54

KESEHATAN

119. Surat dari Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Yogyakarta-Surakarta tentang pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, 1941.
BOW No. AX-66
3 lembar
120. Fragmen SK No. 58260/S Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tentang pendirian Sekolah Juru Kesehatan di Yogyakarta, 26 Juni 1957.
Kabinet Presiden 671
1 lembar

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyebar-luaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.